IMPLEMENTASI PERDA NOMOR: 5 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN

(Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Dalam Program Studi Filsafat Politik Islam

Oleh:

MOHAMMAD SULTHON NEAGARA
NIM: E34213121

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

NAMA : Mohmammad Sulthon Neagara

NIM : E34213121

JURUSAN : Filsafat Politk Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

M. Sulthon Neagara

E34213121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh ***Mohammad Sulthon Neagara*** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 16 Juli 2018

Pembimbing,

Dr. HM. Ismail MH, M.Si
NIP. 196005211986081001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Mohammad Sulthon Neagara* ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 29 Juli 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Plt. Dekan,

Dr. Suhermanto, M.Hum.
NIP. 196708201995031001

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. HM. Ismail MH, M.Si
NIP. 196005211986081001

Sekretaris,

Andi Suwarko, M.Si
NIP. 197411102003121004

Penguji I,

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

Penguji II,

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, M.Ag
NIP. 197206252200501 1007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Sulthon Neagara

NIM : E34213121

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Politik Islam

E-mail address : mohammadsulthon95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR: 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(M. Sulthon Neagara)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAKS

Skripsi ini berjudul Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (studi analisis kebersihan kali tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. 2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebersihan kali tebu melalui Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

Hasil analisis penelitian ini dalam proses penerapan Perda tersebut sudah berjalan namun belum maksimal. hal ini dapat dilihat karena lahirnya komunitas peduli kali tebu adalah bentuk protes terhadap kinerja pemerintah. Kurangnya komunikasi antara pihak dinas dengan warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan sanksi yang menyatakan bahwa membuang sampah akan dikenakan denda seperti yang tertulis dalam Perda tersebut tidak terlaksana semestinya.

Kata kunci: implementasi, kebijakan publik, pengelolaan, kebersihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This thesis entitled Implementation of Regional Regulation Number 5 Year 2014 on Waste Management and Cleanliness (analysis study of cleanliness at Kali Tebu River, Tanah Kali Kedinding Urban Village, Kenjeran Sub-district, Surabaya City). The problems studied in this research are: 1. How the implementation of Bylaw No. 5 of 2014 on Waste Management and Cleanliness. 2. What factors support and impede the implementation of Bylaw No. 5 of 2014 on Waste Management and Cleanliness. The research use qualitative method with observation data collection techniques, interviews, and documentation. Theories used are public policy theory and public policy implementation. The purpose of this study is to analyze the cleanliness of Kali Tebu River through Local Regulation No. 5 of 2014 on Waste Management and Cleanliness.

The results of this research that the law has been implemented, but not effective. This can be seen because the community of Kali Tebu River protest against the performance of the government. The lack of communication between officials and residents of Tanah Kali Kedinding Urban Village and sanctions stating that disposing of garbage will be imposed with a fine as written in the Law is not effective.

Keyword: implementation, public policy, management, hygiene.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI IV

MOTTO V

PERSEMBAHAN VI

KATA PENGANTAR VIII

ABSTRAKSI X

DAFTAR ISI XII

BAB I PENDAHULUAN 1

A. **Latar Belakang** 1
B. **Rumusan Masalah** 6
C. **Tujuan Penelitian** 6
D. **Manfaat Penelitian** 7
E. **Definisi Konseptual** 7
F. **Penelitian Terdahulu** 15
G. **Metode Penelitian** 24
H. **Sistematika Pembahasan** 31

BAB II KAJIAN TEORI 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kebijakan Publik 34
1. Definisi Kebijakan Publik 34
2. Ciri-ciri Kebijakan Publik 42
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 45
4. Kategori Kebijakan Publik 46
5. Analisis kebijakan publik 49

B. Implementasi Kebijakan Publik 52
1. Pengertian Implementasi 52
2. Implementasi Kebijakan 54
3. Teori Kebijakan Publik 56

C. Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan 62

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 65

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 65
B. Fokus Penelitian 66
C. Lokasi Penelitian 66
D. Sumber Data 67
E. Metode Pengumpulan Data 68
F. Teknik Analisis Data 72
G. Metode Keabsahan Data 74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 77

A. Deskripsi Objek Penelitian 77
1. Gambaran Umum Kota Surabaya 77
2. Gambaran Umum Kecamatan Kenjeran 84
3. Gambaran Umum Kelurahan Tanah Kali Kedinding 85
4. Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya 99

B. Penyajian Data 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya 106
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan..... 118

C. Analisa dan Pembahasan 123

1. Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya 123
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan..... 131

D. Hasil Temuan 134

BAB V PENUTUP..... 136

A. Kesimpulan 136

B. Saran 138

DAFTAR PUSTAKA..... 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang

Sistem pemerintahan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang".[1] Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat di kembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.

Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah dan kebersihan terutama di wilayah kota Surabaya. Arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah dan kebersihan. Seperti yang

[1] Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah, UU bab VI pasal 18 ayat 1 Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis di pembukaan perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.[2]

Sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak di inginkan setelah berakhirnya suatu proses yang cenderung merusak lingkungan di sekitarnya. Sampah dapat membawa dampak yang buruk pada kebersihan dan kesehatan manusia bila sampah dibuang secara sembarangan atau di tumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik maka akan menimbulkan berbagai masalah kebersihan dan kesehatan pada masyarakat, karena tumpukan sampah yang dibiarkan tanpa di kelola dengan baik maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit.

Sampah salah satu penyebab banjir, kesadaran masyarakat Surabaya dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama dalam hal membuang sampah masih belum ada kesadaran. Hal tersebut dapat dilihat dari sampah berserakan di pinggir jalan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak peduli dengan lingkungannya sendiri yang berakibat menjadikan *slum area* (lingkungan kumuh) serta lingkungan yang jauh dari persyaratan hidup yang layak. *Slum area* ini menjadi permasalahan yang serius bagi warga dimana banyak rumah berkepadatan tinggi dan tidak teratur yang mempengaruhi lingkungan dan proses dalam kehidupan bermasyarakat.

[2] Surabaya, Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Perda No. 5 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang hingga kini masih menjadi masalah serius di kota-kota besar ialah masalah sampah. Di Kota Surabaya tepatnya Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Tanah Kali Kedinding belakangan ini diramaikan oleh masalah sampah. Komunitas Peduli Kali Tebu yang menuntut pertanggung jawaban pihak pemerintah atas tidak berjalannya Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan mengadakan demo ke kantor DPRD Surabaya, para anggota komunitas Peduli Kali Tebu dan karang taruna Kelurahan Tanah Kali Kedinding ini menginginkan agar peraturan daerah itu tidak sekedar ada namun benar-benar terealisasikan dengan benar. Seperti yang tertulis dalam perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan bab IV pasal 8 yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.[3]

Namu kenyataan yang terjadi warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding belum puas atas pelayanan dari pemerintah karena merasa perda belum berjalan secara efektif. Ini semua berawal dari mirisnya keadaan sungai kali tebu yang berlokasi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding di penuhi dengan sampah rumah tangga, bahkan bangkai kucing, sofa tidak terpakai, dan kasur gabus yang sudah tidak terpakai juga dibuang di sungai. Seakan sungai ini sudah menjadi tempat sampah alternatif warga setempat.

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian ini penulis akan mendalami bagaimana implimentasi kebijakan pemerintah kota surabaya dalam mengelola sampah dan kebersihan sesuai dengan peraturan daerah (perda) Nomor: 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya yang telah menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH). Pengelolaan sampah dan kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding penanganannya masih belum maksimal karena warga sekitar yang belum mempunyai kesadaran bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Sehingga masalah sampah baik dari rumah tangga, pasar maupun industri masih terlihat berserakan di wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Pengelolaan sampah dan kebersihan harus mutlak dilakukan oleh masyarakat, mengingat dampak yang di sebabkan dari ketidak pedulian masyarakat akan menimbulkan keresahan lingkungan terhadap kesehatan. Pada pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "setiap oranng berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".[4] Lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih maka masyarakat akan terjaga dari gangguan lingkungan yang kumuh, sehingga masyarakat merasa aman, tentram dan terhindar dari segala penyakit.

[4] Indonesia (2), Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28H ayat 1 Tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran serta masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pengelolaan sampah dan kebersihan merupakan faktor yang sangat penting. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 28 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor: 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang berbunyi Pentingnya keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan demi mencegah *slum area* dan mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.[5]

Dalam pengelolaan sampah dan kebersihan tidak hanya di butuhkan keikut sertaan masyarakat sekitar, akan tetapi juga dibutuhkan kesadaran para pemilik perusahaan dan industri untuk melaksanakan dan patuh pada Peraturan Daerah (Perda) yang sudah di tetapkan. Memperhatikan penjabaran di atas maka penulis terinspirasi untuk meneliti lebih dalam dengan judul: **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR: 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN (Studi Analisis Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kali Tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)**. Sehubungan dengan latar belakang dan gambaran peraturan daerah dan di perkuat oleh undang-undang diatas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut.

[5] Indonesia (3), Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 18 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sungai kali tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan daerah (Perda) Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dapat dilihat dari beberapa alasan yang telah di paparkan di atas, beberapa manfaat yang akan di dapat dari penelitian ini yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Manfaat teoritis

   a. Menambah pengetahuan tentang penting dan bahayanya lingkungan sehingga memberikan sumbangan ilmu untuk menjaga lingkungan sekitar.

2. Manfaat praktis

   a. Sebagai syarat memenuhi tugas akhir kuliah yaitu skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu

   b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya untuk peneliti.

E. Definisi Konseptual

Judul penelitian ini adalah Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Agar tetap fokus dan tidak keluar dari batasan pembahasan, maka penting untuk menjelaskan definisi konseptual, karena konsep merupakan unsur pokok dalam penelitian.

1. Definisi Implementasi

Implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai pelaksanaan, atau bisa juga penerapan. Menurut Guntur Setiawan (2004) dalam bukunya menyebutkan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

birokrasi yang efektif.[6] Namun menurut pendapat Nurdin Usman (2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[7]

Jika di simpulkan dari beberapa pendapat di atas implementasi adalah suatu proses, tindakan, atau kegiatan dari hasil keputusan yang sebelumnya telah di setujui untuk di jalankan. Biasanya implementasi lebih cenderung dalam hal politik yaitu penerapan kebijakan umum.

2. Definisi Kebijakan

Miriam Budiarjo (2008) dalam bukunya "Dasar-Dasar Ilmu Politik" kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy*, *beleid*), menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu di tentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang

[6] Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) hal 39
[7] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002) hal 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini ada beberapa definisi:[8]

a. Hoogerwerf: obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) di sini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van machtuitoefening*).[9]
b. David Easton: ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making public policy*). David Easton dalam buku *the politichal system* menyatakan, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang di terima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat (*political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society*).[10]

[8] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal 20
[9] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal 21
[10] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan publik dalam devinisi yang mashur dari Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisist merupakan kebijakan.[11]

Menurut Irfan Islamy (2007) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Kebijakan diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya.[12] Namun menurut Budi Winarno (2007) istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan ekonomi Indonesia", "kebijakan ekonomi Jepang" atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.[13]

Shore dan Wright (1997) seperti dikutip oleh Amri Marzali kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah,

---

[11] Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* edisi ke-2 revisi (Yogyakarta: Gava Media, 2017) 17

[12] M. Irfan Islamy *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hal 12

[13] Budi Winarno *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007) hal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara memberi rewards dan santions. Secara intrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah.[14] Ervin (2000) menjelaskan Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*), yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.[15] Dalam kalimat antropologis, kebijakan dapat disebut sebagai "model for behavior" atau "model bagi perilaku." Kebijakan sengaja di susun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman. Singkatnya, kebijakan merupakan "model for behavior" dalam rangka untuk menciptakan "model of behavior." Dilihat dengan cara seperti ini maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultural. Sementara itu, perancangan dan implementasinya adalah suatu proses kultural, tepatnya lagi, proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (*planned sociocultural change*).[16]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu peraturan untuk menyelesaikan masalah yang di buat dan telah di setujui oleh pemerintah untuk mengatur masyarakatnya (kelompok target). Awal dibuat kebijakan biasanya berawal dari realitas

[14] Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik* (Jakarta: kencana prenada media group, 2012) 20
[15] Ibid.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bernilai negatif dari masyarakat, maka dari itu dibuatlah kebijakan (peraturan) demi ketertiban

3. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.[17]

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar. Kebijakan dasar ini biasanya berupa undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Kebijakan dasar tersebut lazimnya mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu

[17] Rian Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012) 674

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan, pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, dan hasil dari kegiatan.[18]

Dapat di simpulkan implementasi kebijakan publik adalah penerapan dari hasil kebijakan yang telah di sahkan untuk di terapkan kepada sasarannya yaitu publik atau masyarakat. Sebagai contoh dalam hal peraturan daerah seperti judul penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan perda nomor: 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan yaitu penerapan peraturan daerah (kebijakan) karena sebelumnya sampah tidak terolah dengan baik yang mengakibatkan aliran sungai terhambat, akhirnya oleh pemerintah dibuat perda nomor: 5 tahun 2014 tentang pengolaan sampah dan kebersihan yang ditujukan kepada publik (masyarakat) agar diharapkan lebih bersih dalam pengelolaan sampah.

4. Definisi Pengelolaan

Menurut Suharsimi Arikunta (1988) pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. [19] Lebih mudahnya pengelolaan adalah proses dari suatu tindakan untuk dijadikan yang sesuai dengan yang diharapkan.

[18] Musliichah, *Bunga Rampai Kearsipan* (Jakarta: UGM Press, 2017) Hal 154
[19] Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988) hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Definisi Sampah

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.[20] Jadi mengacu dari penjelasan ini sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak dipakai dan tidak dibutuhkan atau bahkan tidak disenangi lagi dalam kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan sampah.

6. Definisi Kebersihan

Bersih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas dari kotoran. contoh air bersih bening tidak keruh, tidak tercemar sesuatu yang mengotori. Disini dapat dipahami bahwa bersih adalah terbebas dari kotoran dan dibutuhkan upaya dari manusia sendiri untuk tetap menjaga kebersihan. Dalam ajaran Islam pun kebersihan ini sangat penting seperti yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yaitu: *Annadhofatu Minal Iman* yang artinya kebersihan sebagian dari iman.

[20] Soekidjo Notoatmodjo *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011) hal 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Penelitian Terdahulu

Penting untuk dipaparkan penelitian terdahulu yang membahas sama dengan penelitian ini dan bisa dijadikan tambahan kajian pustaka penelitian. Beberapa penelitian yang dapat kami paparkan adalah:

1. Jurnal Jurnal oleh Novriza Yulida, Sarto Sarto, Agus Suwarni (2016) dari Universitas Gadjah Mada "Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah di Aliran Sungai Batang Bakarek-karek Kota Padang Panjang Sumatera Barat"

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam hal membuang sampah di sungai, jenis penelitian jurnal ini adalah survey dengan rancangan *cross sectional*. Subjek penelitian adalah kepala keluarga yang tinggal di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batang Bakarek-Karek sebanyak 118 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *systematic random sampling.* Variable bebas penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, sarana dan implementasi kebijakan, sedangkan variable terkait adalah perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Hasil yang didapat dari penelitian adalah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku membuang sampah. Subjek dengan sikap baik memiliki perilaku baik 4,6 kali dibandingkan dengan yang mempunyai sikap kurang baik. Hasil penelitian Pakpour *et. Al.* menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumahrumah tangga di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iran. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo bahwa sikap mempengaruhi perilaku. Dengan demikian untuk mendapatkan sikap yang baik dan benar terhadap perilaku membuang sampah, perlu diberikan informasi atau penyuluhan secara rutin tentang pengelolaan sampah maupun bahaya sampah bagi kesehatan dan lingkungan. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah dan bahaya sampah, akan mewujudkan sikap yang baik terhadap pengelolaan sampah dan akan terbentuk perilaku yang tepat dalam melakukan pengelolaan sampah, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan terbebas dari pencemaran sampah.

Berdasarkan hasil analisis diketahui terdapat hubungan yang bermakna pada implementasi kebijakan. Hal tersebut meningkatkan perilaku sebanyak 7,65 kali untuk membuang sampah kebijakan pengelolaan sampah yang diterapkan dikota padang panjang diharapkan dapat membantu dalam mengubah perilaku masyarakat sehingga daya dukung lingkungan dapat terus terjaga, sebab hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku manusia.

Adanya *reward* dan *pubishment* diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu program, misalnya dengan memberikan penghargaan atau hadiah bagi masyarakat yang telah patuh pada kebijakan dan memberikan sanksi pada masyarakat yang melanggar kebijakan. Selain itu *monitoring* dan evaluasi secara rutin setiap bulan juga diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan selaludipantau oleh pemerintah.[21]

2. Jurnal oleh La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor (2015) dari Uneversitas Brawijaya, Kota Malang, yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau"

Hasil dari penelitian ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan tertuang dalam perda nomor 6 tahun 2009 tentang pengelolaan persampahan yang dijabarkan sebagai program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan oleh Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau melalui bidang kebersihan sebagai pelaksana program ialah sebuah program yang lahir untuk menjawab persoalan persampahan dan mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan meningkatkan kebersihan kota dari pemukiman hingga pada ruang publik di kota Baubau. Dalam penjelasan implementasi kebijakan dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan untuk komunikasi yang dibangun oleh pihak Dinas terkait khususnya para pelaksana program di dinas kebersihan belum terlaksana secara optimal, adapun ketersediaan sumber daya yakni sumber daya manusia sejauh ini masih terbatas yang menjadi kendala dalam pencapaian pelaksanaan program yang berpengaruh pada tercapainya program. Hanya saja untuk sarana dan prasarana persampahan mendukung terlaksananya program yang dijalankan.

[21] Novriza Yulida, dkk. (2016) *Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah di Aliran Sungai Batang Bakarek-Karek Kota Padang Pnjang Sumatera Barat.* Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat (BKM). Volume 32 (10): 373-378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait komitmen dan kemauan para pelaksana program khususnya di dinas kebersihan Kota Baubau bersama-sama mengawal untuk mensukseskan pelaksanaan program. Untuk pengelolaan persampahan yang dijabarkan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Baubau belum mempunyai standar yang jelas atau dengan kata lain dinas terkait belum merumuskan *standart operating procedures* (SOP), sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program. Hal ini dalam penangan kebersihan cenderung menggunakan pendekatan persuasif yang sifatnya intruksi-intruksi kepada pelaksana program.[22]

Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah implementasi perda dan membahas tentang persampahan, namun perbedaan yang signifikan selain beda lokasi penelitian juga penulis memfokuskan skripsi pada analisis sungai kali tebu yang datanya di dapat tidak dari pihak dinas saja, melainkan juga dari komunitas, karang taruna, dan warga setempat

3. Jurnal oleh Muhammad Rizal (2011) dari Universitas Taduloka, Palu, dengan judul "Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)"

Hasil yang didapat dari penelitian menyangkut pengelolaan kebersihan kota di Kecamatan Banawa, pengelolaan persampahan di kota Donggala telah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator

[22] La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor (2015) *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Vol 4 (1): 53-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan dengan variabel sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada saat ini. Kecuali variabel partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan/kebersihan menunjukkan indikator yang masih dirasakan kurang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan persampahan di Kota Donggala menunjukkan bahwa kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat seperti kegiatan sosialisasi masih sangat kurang dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kategori sedang. Demikian pula indikator yang berkenaan dengan tingkat pendidikan staf dan tenaga kebersihan, yang masih menunjukkan persentasi kurang memadai yang masih cukup besar.[23]

4. Jurnal oleh Istiqomah Wibowo (2009) dari Universitas Indonesia, Depok, yang berjudul "pola perilaku kebersihan: studi psikologi lingkungan tentang penanggulangan sampah perkotaan"

   Tujuan dari penelitian jurnal ini untuk mendapatkan gambaran pola perilaku kebersihan masyarakat perkotaan dalam kondisi lingkungan bersih dan kotor. Persamaan dengan skripsi penulis ialah membahas tentang penanganan sampah namun yang membedakan adalah skripsi penulis fokus ke implementasi perda yaitu Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

[23] Mohamad Rizal (2011) *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan*. Jurnal SMARTek. Vol. 9 (2): 155-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor-faktor psikologis yang berasal dari individu pelaku dan faktor sosiofisik yang terkait dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan intervensi secara tepat guna menciptakan lingkungan hunian manusia yang bersih dan sehat.

Hasil kesimpulan dari penelitian adalah sampah sebagai stimulus diolah melalui peta kasual pelaku, digabung-gabungkan dengan informasi yang sudah tersimpan dalam ingatan, untuk kemudian diinterpretasi dan diberi makna tertentu. Makna tersebut menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh subyek. Dapat dinyatakan bahwa tindakan-tindakan terhadap sampah didasari oleh makna subyektif pelaku. Tindakan-tindakan warga kota yang bervalensi positif dan muncul pada lima episode perilaku kebersihan, menghasilkan gambaran dari pola perilaku menetap yang disebut sebagai pola perilaku kebersihan Y. Sementara, tindakan pelaku yang bervalensi negatif dan muncul pada lima episode perilaku kebersihan, menghasilkan gambaran dari pola perilaku menetap yang disebut sebagai pola perilaku kebersihan X. Pola perilaku kebersihan (PPK) dibangun, dibentuk, diorganisasikan terus-menerus melalui tindakan-tindakan penghuni, tatanan kejadian-kejadian yang membentuk pola perilaku kebersihan ditentukan oleh *resources* (sumber daya *setting*) dan faktor kontekstual yang melingkupinya.[24]

[24] Istiqomah Wibowo (2009). *Pola Perilaku Kebersihan: Studi Psikologi Lingkungan Tentang Psikologi Lingkungan Tentang Penanggulangan Sampah Perkotaan*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora. Vol. 13 (1): 37-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jurnal oleh Achmad Norival (2018) dari Universitas Negeri Padang yang berjudul “Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku di bagian tengah Batang Ino terhadap sampah dan factor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat membuang sampah ke Batang Ino di Nagari Salimpaun, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

Perilaku masyarakat di bagian tengah Batang Ino terhadap sampah di Nagari Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar sebagian besar masih kurang baik hal ini dibuktikan dari sikap masyarakat yang tinggal dekat aliran BatangIno pada umumnya membuang sampah ke Batang Ino, sampah dikumpulkan di dalam ember atau kantong plastic setelah itu dibunag ke Batang Ino, namun ada juga sebagian kecil dari mereka memilih untuk membakar sampah dibelakang rumah. Sampah di Batang Ino juga berasal dari warga luar Nsgsri Salimpaung yang dibuang pada malam hari dekat jembatan Batang Ino.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat membuang sampah ke Batang Ino adalah faktor internal, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah, motivasi masyarakat untuk merubah perilaku membuang sampah ke Batang Ino, dan persepsi masyarakat untuk merubah perilaku membuang sampah ke Batang Ino, dan persepsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat tentang fungsi sungai sebagai tempat untuk membuang sampah dan faktor eksternal yaitu aspek fisik berupa tersedia di Nagari Salimpaung.[25]

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Novriza Yulida, Sarto Sarto, Agus Suwarni	Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah di Aliran Sungai Batang Bakarek-Karek Kota Padang Panjang Sumatera Barat	Upaya pembinaan, sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan sampah bahaya sampah bagi kesehatan masih perlu menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan sampah secata multan dan berlanjut. Pembentukan kelompok masyarakat yang peduli sungai juga diperlukan
2	La Ode Agus Said, Mardiyono dan Irwan Noor	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau	Kinerja dari dinas kebersihan masih belum berjalan secara maksimal karena disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia. Namun sarana dan prasarana telah mendukung.
3	Muhamma	Analisis Pengelolaan	Dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Boya telah berjalan

[25] Achmad Norival (2018) *Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Buana Vol. 2 (1): 262-273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	d Rizal	Persampahan Perkotaan (Studi Kasus Pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala)	efektif, secara sarana dan prasarana juga telah memadai. Namun yang kurang adalah partisipasi warga kelurahan dalam menerapkan kebersihan.
4	Istiqomah Wibowo	Pola Perilaku Kebersihan: studi psikologi lingkungan tentang penanggulangan sampah perkotaan	Tindakan-tindakan terhadap sampah di dasari oleh makna subyektif pelaku.
5	Achmad Norival	Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung,	Pengetahuan masyarakat sekitar masih minim. Faktor yang mempengaruhi masyarakat membuang sampah ke Batang Ino adalah kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan dan kebersihan yang mengakibatkan ketidak pedulian warga sekitar. Faktor eksternal yaitu aspek fisik berupa fasilitas kebersihan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Kabupaten Tanah Datar	belum tersedia di Nagari Salimpaung

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Rulam Ahmadi, dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif" Strauss, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang meghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku, seseorang atau hubungan-hubungan internasional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara alamiah. Latar atau individu yang hendak diteliti hendaknya memiliki keunikan tersendiri sehingga hasilnya betul-betul bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Keunikan latar atau individu yang menjadi subyek penelitian itu menentukan tingkat bobot ilmiah.[26]

Kemudian jenis penelitian yang diguanakan adalah kritis-rasional. Cara-cara berpikir kritis-rasional merupakan cara-cara perburuan kebenaran

[26] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (YogyakartaL Ar-Ruzz Media, 2014) hal 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Akal budi manusia memberi konsekuensi terhadap kemampuan manusia untuk berpikir. Karena itu, berpikir adalah salah satu aktivitas batiniah manusia. Dengan demikian akal menuntun manusia untuk berpikir, dan berpikir dengan sesungguhnya menggunakan proses berpikir, menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, menggunakan obyek berpikir dan menghubungkannya dengan obyek lainnya, membuat tesa dan mengkajinya dengan antitesa, kemudian menghasilkan tesis, maka proses ini dinamakan proses berpikir kritis-rasional.[27]

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi sesuai dengan judul yaitu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dengan alasan karena di daerah tersebut terdapat sungai yang bernama kali tebu, dengan kondisi sampah yang selalu menghambat aliran. Sungai itu meliputi beberapa kelurahan yaitu kelurahan Tanah Kali Kedinding dan Kelurahan Bulak Banteng.

3. Penentuan Informan

Pemberi informasi atau biasa disebut Informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yang dihubungi oleh peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang

[27] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat.[28] Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.[29] Arikunto juga menjelaskan *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.[30] Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan *Purposive Sampling* secara bahasa adalah kata purposive memiliki arti sengaja. Jadi penulis menentukan sampel sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh penulis. Pertimbangan penulis untuk mencari informan adalah yang berkaitan atau terlibat dengan tema penelitian dan mengetahui tentang permasalahan penelitian. Beberapa pertimbangan tersebut yaitu penulis menentukan informan dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijauh (DKRTH) Kota Surabaya, pegawai atau staf Kelurahan Tanah Kali Kedinding, komunitas peduli kali tebu, dan warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya

[28]Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (YogyakartaL Ar-Ruzz Media, 2014) hal 92

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983) Hlm. 65
[30] Asrof Syafi'i, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Elkaf, 2005) 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. berikut penjelasannya:[31]

a. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan pengurus Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Komunitas Peduli Kali Tebu, dan Warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud data sekunder adalah Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dan dokumen yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian membutuhkan teknik-teknik kualitatif. Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain : (1) Observasi partisipasi, (2) Wawancara mendalam, (3) *life history,* (4) analisis dokumen, (5) catatan

[31] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hal 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harian peneliti (kesan saat mengumpulkan data) dan (6) analisis isi media.[32] Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan (menggambarkan) fenomena yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model yang telah ditunjukkan oleh Miles dan Hubberman sebagai berikut:[33]

a. Reduksi data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

---

[32] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 143

[33] Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penarikan kesimpulan

Setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid saat kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel terpercaya.

7. Teknik Validitas Data

Uji kevaliditasan dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan. Hingga kemudian dibentuk teknik pengujian keabsahan data yang diberi nama dengan teknik pemeriksaan.[34] Karena dalam penelitian kualitatif menjaga keabsahan data yang diperoleh merupakan faktor yang utama. Maka dalam melakukan keabsahan data peneliti perlu memeriksa data kembali sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan. Agar tidak terjadi kesalahan, maka peneliti melakukan uji kredibilitas data. Menurut Sugiyono, dalam uji kredibilitas data terdapat empat macam cara, [35] yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dan member chek. Dalam

[34] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 257

[35] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.* (Bandung : Alfabeta, 2014) hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini, peneliti mengunakan metode triangulasi dalam melakukan teknik validitas data.

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik, dan sumber data yang telah diperoleh. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan, triangulasi sumber berarti peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.[36]

Peneliti menggabungkan semua hasil penelitian, dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan kata lain, triangulasi merupakan menguji keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teori, dan sumber data.[37] Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, maka data yang diperoleh dianggap kredibel. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap triangulasi data sebagai berikut:

1) Peneliti melakukan pengecekan tentang hasil dari pengamatan wawancara, maupun hasil data yang diperoleh dengan cara observasi dan dokumentasi.
2) Penulis meneliti apa yang dikatakan informan tentang perda nomor 5 tahun 2014 dengan mengecek data yang sudah ada apakah sesuai atau tidak.

[36]Ibid, hal. 83
[37] Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Membandingkan pendapat atau perspektif informan satu dengan informan yang lain.
4) Membandingkan wawancara dengan isi dokumen.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi lima bab dengan penjelasan yang berbeda-beda. Mulai dari bab satu hingga bab lima. Berikut penjelasannya:

Bab satu yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah dalam Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu kajian teori, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan yaitu teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan publik.

Bab tiga yaitu metodologi penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan data.

Bab empat yaitu hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan gambaran umum Kota Surabaya, gambaran umum Kecamatan Kenjeran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran umum Kelurahan Tanah Kali Kedinding, penyajian data, analisa dan pembahasan, dan yang terakhir hasil temuan penelitian.

Bab lima yaitu penutupan, menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat selama penelitian dan memberikan saran untuk permasalahan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan oleh peneliti mengenai teori yang akan di gunakan untuk menganalisis dari rumusan masalah yang telah di tulis di bab sebelumnya.Menurut buku yang di tulis oleh Andi Prastowo (2011) landasan teori adalah teori-teori yang dianggap paling relevan untuk menganalisis objek penelitian sebagai alat, teori tersebut dipilih yang paling memadai, tepat baik dalam kaitannya dengan hakikat maupun kebaruan.[1]

Sehubungan dengan tema penelitian yaitu tentang "Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Studi analisis pengelolaan sampah dan kebersihan kali tebu di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya)" maka beberapa teori yang dianggap paling relevan untuk di gunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik. Teori kebijakan publik di gunakan dalam penelitian ini dikarenakan fokus penelitian berlandaskan pada Peraturan Daerah, untuk mengetahui bagaimana peraturan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan diterapkan. Dan mengetahui upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah dan kebersihan. Kemudian dihalaman akhir penulis juga menjelaskan tentang isi Perda Kota Surabaya Nomor: 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, agar mempermudah pembaca dalam memahami judul skripsi ini.

---

[1] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) hal 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Banyak sekali pendapat para ahli dalam mendefinisikan kebijakan publik, salah satunya yang populer di Indonesia pendapat Miriam Budiarjo (2008) dalam bukunya "Dasar-Dasar Ilmu Politik" kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*), menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini ada beberapa definisi:[2]

a. Hoogerwerf: obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) di sini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van machtuitoefening*).[3]
b. David Easton: ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making public policy*). David Easton dalam buku *the*

[2] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) Hal 20-21
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politichal system menyatakan, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang di terima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat (*political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society*).[4]

Kebijakan adalah suatu keputusan yang mencerminkan sikap suatu organisasi terhadap suatu persoalan yang telah, sedang, atau akan dihadapi. Organisasi yang dimaksud meliputi organisasi pemerintah dan swasta, kebijakan adalah keputusan yang hanya berlaku di wilayah Internal organisasi pemerintah (aparatur) atau organisasi swasta (karyawan).[5]

Sementara kebijakan publik diartikan sebagai kebijakan yang berlaku secara umum, dengan begitu organisasi yang berwenang/mampu membuat kebijakan yang berlaku secara luas/umum adalah pemerintah sehingga tepat untuk mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang mencerminkan sikap pemerintah terhadap suatu persoalan yang telah sedang,

[4] ibid
[5] Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau akan dihadapi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertugas menjaga kelangsungan hidup dan ketertiban warga negara.[6]

Namun menurut Ramlan Surbakti (2010) dalam bukunya yang berjudul "Memahami Ilmu Politik" Pada dasarnya, isi kebijakan umum dibedakan menjadi tiga yaitu ekstraktif, alokasi, distribusi, dan regulatif.[7] Agar dapat menganalisis secara lebih mendalam isi kebijakan umum, berikut ini dikemukakan tipologi lain seperti yang disusun oleh Theodore Lowi (Ramlan, 2010:245). Kalau ketiga tipe kebijakan di atas dikategorisasikan atas dasar pemanfaatan dan beban yang dikenakan kepada individu anggota masyarakat, Lowi mengategorisasikan kebijakan umum menjadi empat tipe berdasarkan dua kriteria, yaitu dikenakan tidaknya suatu paksaan secara langsung (immediate coer-cion) dan langsung tidaknya kebijakan diterapkan pada individu. Kedua, kriteria ini dikemukakan dengan asumsi bahwa pemahaman akan kekuasaan paksaan (*coercive force*) dari pemerintah dan bagaimana kekuasaan diterapkan merupakan kondisi utama bagi pemahaman pembentukan dan pelaksanaan kebijakan umum. Sebagaimana dikemukakan di atas, ciri khas kebijakan umum (keputusan politik pada umumnya) sebagai produk tindakan pemerintah ialah sifatnya yang mengikat, dalam arti pelaksanaannya ditegakkan dengan kewenangan memaksakan secara fisik yang

[6] Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
[7] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010) 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimonopoli oleh pemerintah. Keempat kebijakan umum itu ialah regulatif, redistributif, distributif, dan konstituen.[8]

Pertama, kebijakan regulatif terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Biasanya kebijakan regulatif dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan suatu tindakan yang tak diperbolehkan, seperti undang-undang hukum pidana, undang-undang anti monopoli dan kompetisi yang tak sehat, dan berbagai ketentuan yang menyangkut keselamatan umum. Dalam hal ini, pengawasan obat dan makanan serta keselamatan kerja. Selain itu, kebijakan regulatif dibuat untuk memaksakan agar individu melakukan suatu tindakan hingga kepentingan umum tidak terganggu seperti berbagai bentuk perizinan dalam menggunakan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public goals).[9]

Kedua, kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada warga negara, tetapi penerapannya melalui lingkungan. Pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat kepada orang lain melalui berbagai program pemerintah merupakan inti kebijakan redistributif. Hasil penerapan undang-undang pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak bumi,dan bangunan, pajak atas keuntungan dan bunga tabungan, dan iuran listrik, yang digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, seperti jalan,

[8] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010) Hal 246
[9] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jembatan, sekolah, dan rumah sakit merupakan contoh kebijakan redistributif. Retribusi seperti tiket parkir bukan kebijakan redistributif karena ia dikenakan secara sama kepada setiap orang yang menggunakan fasilitas umum.[10]

Ketiga, kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung (kemungkinan pengenaan paksaan fisik sangat jauh), tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu. Individu dapat menarik manfaat dari kebijakan itu, walaupun tidak dikenakan paksaan kepada individu untuk menggunakannya. Dalam pengertian yang lebih konkert, kebijakan distributif berarti penggunaan anggaran belanja negara atau daerah untuk memberikan manfaat secara langsung kepada individu, seperti pendidikan dasar yang bebas biaya, subsidi kepada sekolah lanjutan dan perguruan tinggi negeri, subsidi energi bahan bakar minyak, subsidi sarana produksi pertanian, pelayanan kesehatan, fasilitas jalan raya, dan pemberian hak paten kepada individu yang berhasi menemukan sesuatu yang baru.[11]

Keempat, kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang sangat jauh dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan. Walaupun tipe ke empat ini merupakan konsekuensi logis dari tipe ke tiga sebelumnya, sebenarnya tipe ini merupakan kategori sisa (*residual category*) yang mencakup tipe-tipe lain yang tidak dapat dimasukkan kedalam tipe ketiga sebelumnya. Kebijakan konstituen mencakup dua lingkup bidang garapan, yaitu urusan keamanan nasional dan luar negeri,

[10] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)
[11] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berbagai dinas pelayanan administrasi. Yang pertama mencakup pertahanan dan keamanan, badan intelijen, ketertiban umum, diplomasi dan penerangan luar negeri dari kementerian luar negeri. Yang kedua lebih bersifat pelayanan kepada pemerintah daripada kepada bangsa, seperti lembaga administrasi negara, badan administrasi kepegawaian negara, percetakan negara, biro statistik, pengkajian dan penerapan teknologi, dan pemetaan nasional.[12]

Dalam buku "Analisis Kebijakan Publik" yang di tulis oleh Solichin Abdul Wahab (2015) menjelaskan tentang contoh definisi kebijakan publik. Beberapa contoh definisi kebijakan publik yang mencakup luas yaitu Eystone (1971:18) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan publik ialah "*the relationship of governmental umit to its environment"* (antara hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi yang pernah di sodorkan oleh Wilson (2006:154) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut, "*the actions, objectives, and pronouncements of goverments on particular matters, the steps they take (or fail to fake) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)"* tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk di

[12] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2010) Hal 245-248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang di berikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).[13]

Definisi tersebut karena terlampau luas, tentu saja berisiko mudah menggelincirkan orang atau bahkan menyesatkan bagi mereka yang baru saja mengenal dan mempelajari kebijakan publik. Dalam situasi seperti itu, bisa saja menyebabkan seseorang tetap tidak dapat memahami dengan baik apa hakikat kebijakan publik yang sebenarnya. Definisi lain yang tak kalah luasnya dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1978; 1987:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik ialah *"whatever goverments choose to do or not to do"* (pilihan tindakan apapun yang ingin dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).[14]

Pakar Inggris, W.I Jenkis (1978: 15) *"Aset of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve"* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).[15]

---

[13]Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)
[14] Ibid.
[15] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chief J.O. Udoji, pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*an santioned course af action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*" (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).[16]

Lemieux, seorang pakar dari Prancis (1995:7), menyatakan kebijakan publik sebagai "*The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time*" (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).[17] Pendapat yang mudah dipahami di sampaikan oleh Woll seperti yang dikutip oleh Tangkilisan (2003:2) menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.[18]

Dari beberapa pendapat para ahli di atas yang telah di paparkan oleh penulis, telah jelas bahwa kebijakan publik (*public policy*) tidak luput dari keterlibatan pemerintah, dalam pembuatan kebijakan di harapkan agar pemerintah mampu merubah Negara/Daerahnya lebih teratur dari sebelumnya.

---

[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18]Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi* (Yogyakarta: Lukman Offiset YPAPI 2003) 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dalam kebijakan diperlukan sasaran (target) yang diatur yaitu masyarakat, dan diharapkan menghasilkan hasil (*Output*) yang baik.

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah sebuah aktivitas yang khas, dalam artian ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain.[19] Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton (1953: 1965) disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas dalam sistem politik. Dalam sistem politik masyarakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat atau pun ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat modern yang kompleks mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan sejenisnya.[20]

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional kata Gerston (2002: 3) kebijakan publik itu dibuat dan dijalankan oleh "*people who have been authorized to act by popular consent and in accordance estabilished norms and procedures*" (orang yang telah diberi wewenang untuk bertindak dengan persetujuan populer dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur). Di negara-negara demokrasi seperti itu kebanyakan para pembuat kebijakan publik terdiri dari pejabat-pejabat yang dipilih (*elected officials*).[21]

Di Indonesia contoh para pejabat dalam kategori ini misalnya Kepala Keoplisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, komisioner-komisioner

[19] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2015) 17
[20] Ibid.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota-anggota pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). Para pejabat publik ini proses rekrutmennya melewati mekanisme seleksi dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR, namun pengangkatannya dilakukan dengan keputusan presiden. Mereka itu tanpa kecuali dapat kita sebut sebagai orang-orang yang memanajeri dan memegang amanah publik. Oleh sebab itu baik langsung atau tidak langsung perilaku mereka harus bertanggung jawab pada publik. Jika suatu saat mereka sampai tergelincir melakukan perbuatan tak pantas seperti terlibat dalam hal seks atau korupsi, bukan tak mungkin bisa berakibat terhambatnya perjalanan karir, dihukum sesuai undang-undang yang berlaku bahkan dilengserkan dari jabatannya. Hal ini membawa implikasi atau keterlibatan tertentu terhadap konsep kebijakan publik, yang secara rinci akan dijelaskan dibawah ini:[22]

Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekadar perilaku atau tindakan yang menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan, dan serba kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik semisal kebijakanpembangunan atau kebijakan sosial dalam sistem-sistem politik modern, bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan atau asal-asalan, melainkan tindakan yang direncanakan (*by planed*).

Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan

[22] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan (*Jakarta: PT Bumi Askara, 2015) 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detai, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.

Ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyata dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam mengatur perdagangan, meningkatkan pendidikan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin juga negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tahap-Tahap Kebijakan

Tahap-tahap kebijakan menurut Wiliam Dunn (1999) yakni: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Berikut penjelasannya:[23]

a. Penyusunan agenda

Para pengambil kebijakan (eksekutif, legislatif) menginventarisir persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Dari berbagai persoalan yang telah di inventasrisir maka akan dilihat mana persoalan yang dapat di tempatkan sebagai prioritas untuk diselesaikan. Sehingga tidak semua persoalan yang ada (telah di inventarisir) dapat dijadikan sebagai sebuah persoalan yang akan di tindak lanjuti melainkan akan di tunda, dan mendahulukan persoalan yang dianggap prioritas.

b. Formulasi kebijakan

Pada tahap ini, persoalan yang telah disepakati sebagai prioritas yang harus di selesaikan kemudian dibahas bersama dengan pencarian pemecahan masalah. Dalam situasi ini banyak alternatif pemecahan masalah di paparkan dan bisa dikatakan berbagai alternatif pemecahan masalah yang terbaik.

c. Adopsi kebijakan

Dari berbagai alternatif pemecahan masalah (solusi) yang ditawarkan pada tahap formulasi kebijakan maka pada tahap ini pengambilan kebijakan harus memilih satu alternatif pemecahan masalah dari yan

[23] Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) 59-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersedia. Dan alternatif inilah satu-satunya sebagai alternatif yang akan diadopsi sebagai alternatif pemecah masalah berupa kebijakan.

d. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diadopsi kemudian diimplementasikan. Inmplementasi kebijakan akan menjadi efektif kepada warga negara apabila kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga negara sehingga warga negara mengetahui secara pasti bahwa kebijakan tersebut sungguh benar atau sah keberadaannya.

e. Evaluasi kebijakan

Setelah kebijakan diimplementasikan, pada tahap ini harus diikuti dengan tahap monitoring agar perkembangan kebijakan dapat diketahui, dalam arti kebijakan tersebut bisa diterima oleh mayoritas warga negara atau tidak diterima oleh mayoritas warga negara.

4. Kategori Kebijakan Publik

Banyak sekali pengkategorian kebijakan publik berikut ini kategori kebijakan publik menurut beberapa ahli. James E. Anderson menyampaikan ketegori kebijakan sebagai berikut:[24]

a. Kebijakan substansi dan kebijakan prosedural

Kebijakan substansi yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalakan.

[24] Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus redistributif

Kebijakan distributif adalah suatu kebijakan yang menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Sedangkan kebijakan regulatori sendiri merupakan kebijakan yang berupa pembatas atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan dan hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan yang berupa sumberdaya komplit yang di tujukan pada kelompok sasaran. Adapun kebijakan simbolis sendiri adalah suatu kebijakan yang memberikan manfaat simbolis atau sebagai lambang atas kebijakan tersebut.

d. Kebijakan *public good* dan kebijakan *private good*

Yakni kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat good* adalah suatu kebijakan barang privat yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab mengutip dari Suharno (2010:25-27) mengatakan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memperinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:[25]

a. *Policy Demands* (Tuntutan Kebijakan)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan oleh masyarakat kepada pejabat pemerintah dan dilakukan oleh aktor lain baik dari pihak swasta maupun pemerintah sendiri. Dalam sistem politik ini bertujuan untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan kebijakan sangat bervariasi, mulai dari desakan umum, dengan tujuan agar pemerintah berbuat sesuatu hingga untuk mengambil tindakan konkrit terhadap suatu masalah yang terjadi pada masyarakat.

b. *Policy Decisions* (Keputusan Kebijakan)

Keputusan kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberikan arahan terhadap suatu kebijakan publik. Dalam hal ini termasuk keputusan-keputusan untuk menciptakan status (ketentuan dasar), ketetapan atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. *Policy Statements* (Pernyataan Kebijakan)

Pernyataan kebijakan ialah pernyataan atau penjelasan secara resmi mengenai suatu kebijakan publik tertentu. Seperti halnya ketetapan MPR, keputusan Presiden, Dekrit Presiden, keputusan peradilan. Pernyataan

[25] Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014) 25-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah juga di laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. *Policy Outputs* (Keluaran Kebijakan)

Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat di lihat yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena menyangkut yang telah dilakukan dengan tujuan merealisasikan apa yang telah di gariskan dalam suatu keputusan dan pernyataan kebijakan. Singkatnya kebijakan ini menyangkut atas apa yang ingin di kerjakan oleh pemerintah.

e. *Policy Outcomes* (Hasil Akhir Kebijakan)

Hasil akhir kebijakan adalah akibat atau dampak yang telah dirasakan masyarakat baik yang di harapkan atau pun tidak sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintahan dalam suatu bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada di masyarakat.

5. Analisis Kebijakan Publik

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai analisis kebijakan. Pendapat yang dirasa paling relevan menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yaitu pendapat Ericson (1970) dalam tulisannya, "*The Policy Analysis Role of the Contemporany University,*" merumuskan analisis kebijakan publik sebagai: "*...public policy analysis is a future-oriented inquiry into the optimum means of achieving a given set of social objectives*" (penyelidikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang di inginkan).[26]

Dror (1971) juga mendefinisikan kebijakan sebagai "*an approach and methodology for design and identification of preferable alternatives in respect to complex policy issues"* (suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang di kehendaki berkenaan dengan seumlah isu yang kompleks).[27]

Sedangkan Kent (1971) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai: "*...that kind of systematic, disciplined, analytical, scholarly, creative study whose primary motivasion is to produce well-supported recommendations for action dealing with concrete political problems"* (sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah politik yang konkret).[28]

Dalam lingkar tradisi akademis pemikiran studi-studi kebijakan, terutama yang berkaitan dengan analisis kebijakan publik, sudah lama di kenal adanya berbagai pendekatan (*approaches*) yang dikembangkan oleh para pakar/teoritis kebijakan publik. Pendekatan-pendekatan itu, masing-masing tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dimaksudkan untuk dapat memotret dan memahami fenomena kebijakan atau problema kebijakan tertentu.[29]

---

[26] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan (*Jakarta: PT Bumi Askara, 2015)
[27] ibid
[28] ibid
[29] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan (*Jakarta: PT Bumi Askara, 2015) 40-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Patton dan Savicky analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.[30] Dunn menjelaskan ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif, dan model integratif:[31]

a. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan "sebelum" suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model preditif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (*forecasting*) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan.
b. Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan "setelah" suatu kebijakan di implementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluatif terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
c. Model integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik "sebelum" maupun "sesudah" suatu kebijakan dioperasikan.

---

[30]Rian Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003)
[31] Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: AlfaBeta, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis kebijakan publik telah berkembang jauh sebelum minat pada studi implementasi muncul, bahkan analisis studi evaluasi lahir terlebih dahulu, analisis kebijakan publik adalah kajian multi disiplin terhadap kebijakan publik yang bertujuan mengintegrasikan dan mengonteksualisasikan model dan riset dari disiplin tersebut yang mengandung orientasi problem dan kebijakan.[32] Harold Laswell (2005) juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik adalah analisis yang *multimethod, multidisciplinary*, berfokus pada masalah, berkaitan dengan pemetaan kontekstualitas masalah kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijakan.[33] Maka dengan demikian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan publik. Karena analisis kebijakan adalah kajian dari awal pembuatan kebijakan atau kebijakan yang sudah ada untuk lebih mengefektifkan kebijakan yang akan dibuat dengan cara menganalisis terlebih dahulu.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang cepat dan tepat bergerak, dimana pelaksanaan kebijakan ini melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan di setujui, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu

[32] Wayne Parsons, *Public Policy* (Jakarta: Prenada Media, 2005) 12
[33] Wayne Parsons, *Public Policy* (Jakarta: Prenada Media, 2005) 12-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program melibatkan upaya *policy maker* dengan tujuan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar mampu memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.[34]

Implementasi menurut Jones (1996) adalah suatu proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter adalah tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan di tetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.[35]

Menurut Zainal Abidin (2016) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetapan strategi implementasi.[36]

Menurut wahyu Nurharjadmo, studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama dari proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpa balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga

[34] AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 87
[35] Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hal 61
[36] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta,2016)45-52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah di tetapkan, aelanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.[37] Sedangkan kejelasan makna implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho (2012) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih atau pun kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivant* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.[38]

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.[39] Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain *keppers*, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain.[40]

---

[37] Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008)
[38] Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008) hal 7
[39] Rian Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012) 674
[40] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi kebijakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena implementasi kebijakan adalah proses dimana kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan. Jika tidak ada implementasi maka akan sia-sia kebijakan yang telah dibuat karena kebijakan tersebut tidak pernah terealisasikan dan tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan (*output*). Seperti dikutip dari tulisan Samodra Wibawa dalam bukunya implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan di bedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain didalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit.[41]

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan di setujui langkah berikutnya bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker*

[41] Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.[42]

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Ada beberapapendapat dari para ahli mengenai model implementasi kebijakan publik yang akan dijelaskan, beberapa model itu adalah:

a. Teori George C. Edward III (1980)

menjelaskan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran *(target group)* sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya,adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
3. Disposisi,adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
4. Struktur Birokrasi, yaitu yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah

[42] AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya prosedur operasi standart *(standart operating procedures* atau SOP).[43]

b. Teori Merilee S. Grindle (1980)

yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Gridle dalam Nugroho (2006:634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di rubah/ditransformasikan, kemudian implmentasi kebijakan baru dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:[44]

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang dihasilkan;
3. Derajat perubahan yang diinginkan;
4. Kedudukan pembuat kebijakan;
5. Siapa pelaksana program;
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan lingkungan kebijakan *context of implementation* mencakup:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
2. Karakteristik lembaga dan penguasa;
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

[43] Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* edisi ke-2 revisi (Yogyakarta: Gava Media, 2017) 31
[44] Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016) 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teori Hogwood dan Gunn (1978)

menjelaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:[45]

Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaganatau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.

1. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan fisibilitas atau kelayakan implementasi kebijakan.
2. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas oleh karena itu implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan baik dalam konteks sumberdaya maupun sumber-aktor. Salah satu contoh adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan efektif jika kerjasama antar departemen dan antar daerah tidak terbangun secara efektif.
3. Apakah kebijakan yang akan di implementasikan didasari hubungan klausal yang andal. Jadi prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Dalam metodologi dapat di sederhanakan menjadi apakah jika X akan menjadi Y.

Sebenarnya model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang

[45]Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistematis dan tidak meninggalkan kaidah pokok. Kelemahan konsep ini tidak secara tegas menunjukkan mana yang bersifat politis, strategis, teknis dan operasional.

d. Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Dalam Subarsono (2010) dijelaskan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, berikut ketiga variabel tersebut:[46]

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), adapun indikatornya:
   a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
   b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
   c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
   d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statue to structure implementation*), indikatornya:
   a. Kejelasan isis kebijakan
   b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
   c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
   d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagi institusi pelaksana
   e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
   f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

[46] AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan

3. Variabel lingkungan *(nonsatutority variables affecting implementation)*, indikatornya:

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan

c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groupsi*)

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

e. Teori Daniel S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Dalam subarsono (2010) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:[47]

1. Standar dan sasaran kebijakan

   Standar dan sasaran kebijakan ini harus di jelaskan dan terukur, sehingga tidak menimbilkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber daya

   Kebijakan perlu di dukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

   Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

[47] AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Karakteristik agen pelaksana

   Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial

   Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

   Ini mencakup tiga hal penting yaitu:

   a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
   b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
   c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

f. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999)

Menurut Weimer dan Vining (2010) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:[48]

[48] AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Logika dari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

g. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondineli (1983)

Menurut Cheema dan Dennis (2010) ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.[49]

C. Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya

Sampah di definisikan sebagai suatu benda yang tidak di gunakan atau tidak dikehendaki dan harus di buang. Yang dihasilkan dari kegiatan manusia.[50] Soekidjo juga menjelaskan dalam bukunya bahwa sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (waste) adalah suatu yang tidak

[49] AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
[50] Karden E. Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.[51]

Dalam perda Nomor: 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan bahwa pertumbuhan penduduk yang terus meningkat secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produksi sampah. Penanganan sampah memerlukan perhatian khusus yang jika tidak segera di tangani dan dikelola dengan baik akan semakin berdampak pada lingkungan hidup seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Selain itu sampah yang dibuang secara terbuka dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah dan di minimalisir sehingga selalu terjaga kebersihannya. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56)[52]

Dalam ajaran Islam sangat penting menjaga kebersihan, selain untuk kesehatan diri sendiri juga untuk menjaga apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Demikian dapat dilihat dari beberapa paparan di atas bahwa pentingnya menjaga kebersihan tidak hanya diserukan oleh Perda namun Islam juga sangat peduli terhadap kebersihan. Berdasarkan undang-undang Nomor: 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, yang operasional

[51]Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni* (Jakarta: PT RinekaCipta, 2011)
[52] http://dsmuda.com/jangan-buang-sampah-sembarangan/ diakses tanggal 31 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha serta dapat melibatkan organisasi pengelola sampah maupun masyarakat. Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan sampah di kota Surabaya agar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, perlu adanya dasar hukum pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam peraturan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Ratna seperti dikutip prastowo metode adalah cara-cara strategi untuk memahami realitas dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya.[1] Sedangkan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[2]

Menurut Rulam Ahmadi, dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif" Strauss, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang meghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku, seseorang atau hubungan-hubungan internasional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara alamiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

[1]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 183
[2] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya.

Kemudian jenis penelitian yang diguanakan adalah kritis-rasional. Cara-cara berpikir kritis-rasional merupakan cara-cara perburuan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Akal budi manusia memberi konsekuensi terhadap kemampuan manusia untuk berpikir. Karena itu, berpikir adalah salah satu aktivitas batiniah manusia. Dengan demikian akal menuntun manusia untuk berpikir, dan berpikir dengan sesungguhnya menggunakan proses berpikir, menghubungkan satu hal dengan hal lainnya, menggunakan obyek berpikir dan menghubungkannya dengan obyek lainnya, membuat tesa dan mengkajinya dengan antitesa, kemudian menghasilkan tesis, maka proses ini dinamakan proses berpikir kritis-rasional.[3]

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan ke perda, yaitu perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Guna menganalisis bagaimana pengelolaan sampah dan kebersihan sungai kali tebu yang berlokasi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang jadi target penulis untuk melakukan penelitian adalah Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dengan alasan karena di Kelurahan ini terdapat sungai yang kondisinya sangat miris dan

[3] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah tidak terurus lagi. Sungai ini bernama kali tebu, dimana kali tebu ini menjadi ikon Kelurahan Tanah Kali Kedinding karena sungainya yang cukupluas. Selain itu,sungai ini adalah aliran terakhir yang akan di arahkan ke laut, jadi sangat miris jika melihat keadaan sungai tebu ini masih terhambat oleh tumpukan sampah warga sekitar.

Sungai tebu atau biasa di sebut kali tebu ini membentang dari utara pemakaman umum Rangkah Surabaya hingga ujung utara Kota Surabaya yakni wilayah Kelurahan Tambak Wedi. Secara geografis sungai tersebut sebagian sebelah barat masuk wilayah Kecamatan Simokerto dan wilayah Kecamatan Tambaksari di sisi timur sungai. Selebihnya yang sebagian besar sungai tersebut masuk Kecamatan Kenjeran.[4] Namun mirisnya sungai tebu ini dipadati oleh tumpukan sampah hingga mengakibatkan pencemaran sungai.

Kemudian selain kondisi sungai yang tercemar di Kelurahan Tanah Kali Kedinding ada komunitas yang bernama komunitas peduli kali tebu. Komunitas ini lah yang mengawali perubahan mulai dari merawat sungai hingga demonstrasi ke gedung DPRD Surabaya untuk meminta kejelasan sebagaimana perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan tidak berjalan efektif.

D. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan atau tidak valid. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti

[4] Komunitaspedulikalitebusurabaya.blogspot.co.id (di akses pada tanggal 10 Mei 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. berikut penjelasannya:[5]

a. **Sumber data primer** adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari aktor utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pengurus Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, Komunitas Peduli Kali Tebu, dan warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

b. **Sumber data sekunder** adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud data sekunder adalah Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengeoloaan Sampah dan Kebersihan, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, dan juga dokumen-dokumen penunjang lainnya yang dapat digunakan untuk penguat data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling penting dalam melakukan penelitian karena dengan demikian kita mendapatkan data yang kita butuhkan dalam penelitian untuk di analisis. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasannya:

[5] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hal 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai peninjauan atau pengamatan, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berpartisipasi dan yang tidak berpartisipasi. Pada pengamatan tanpa peran serta pengamatan hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja sedangkan pengamatan berpartisipasi melakukan dua peranan sekaligus yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi non-partisipan karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu pekerjaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya dalam menangani permasalahan sampah serta tidak terlibat dalam aktivitas sebagai pemilah sampah atau pemulung. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.[6]

2. Wawancara

wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.[7] Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara mendalam. Adapun wawancara mendalam ini secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

[6]Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) 176
[7]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.[8] Dengan cara demikian peneliti akan menggali informasi mengenai perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan kepada informan yang telah di tentukan peneliti. Adapun informan yang dipilih penulis adalah:

a. Ibu Anis Pujiastutik, selaku staf di Kelurahan Tanah Kali Kedinding.
b. Bapak Eko Selaku staf di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya
c. Bapak Indra selaku staf di UPTD saluran pematusan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya.
d. Ibu Siti Komsoh Selaku Staf Yustisi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya.
e. Bapak Joko selaku Koordinator Yustisi Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya.
f. Bapak Budi selaku pembina komunitas peduli kali tebu Surabaya.
g. Cahyo Selaku ketua komunitas peduli kali tebu.
h. Firman Solikhudin selaku warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

3. Dokumentasi

Kajian dokumentasi atau pengumpulan bukti adalah cara pengumpulan informasi yang di dapatkan dari dokumen, yakni rapor, peraturan perundang-

[8]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan, peninggalan tertulis, arsip, akta ijazah, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain memiliki keterkaitan dengan masalah yang di teliti.[9] Dokumen tidak hanya catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan yang akan datang, tetapi juga catatan di masa lalu. Sementara kegunaan teknik dokumentasi ini menurut Prastowo.[10] seperti yang dijelaskan berikut:

a. Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara.
b. Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan atau wawancara lebih kredibel (dapat dipercaya) dengan dukungan sejarah kehidupan pribadi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
c. Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini disebabkan dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Namun data-data yang akan diperoleh penulis tidak hanya berupa gambar atau foto, tetapi juga bisa berupa diagram, tabel data yang diberikan oleh pihak informan yaitu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan Komunitas Peduli Kali Tebu. Dokumen yang diperoleh penulis diantaranya profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya, peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

---

[9]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 226
[10] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif seperti yang sudah di jelaskan di bab 1. Dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, selama penulis berada dilapangan penulis akan menganalisis tahapan analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.[11] Menurut herdiansyah (2010) dalam tulisannya menjelaskan reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diubah menjadi tulisan.[12]

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang mengarahkan, menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.[13]

---

[11] Ibid. Prastowo, hal 242.
[12] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) 164-165
[13] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyajian Data (*Data Display*)

setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilakn tindakan. Menurut prastowo dalam bukunya, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang baik merupakan cara utama bagi analisis kualitatif. Beberapa jenis bentuk penyajian data adalah jaringan, grafik, matriks, bagan dan lain sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun baik dalam suatu bentuk yang padu.[14]

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Yang terakhir dalam teknik analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah di dukung oleh bukti-bukti yang jelas dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya.[15]

[14] Ibid hal 244
[15] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif (keadaan yang sebenarnya). Dengan demikian keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangatlah penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai dengan maksimal.

Uji kevaliditasan dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan. Hingga kemudian dibentuk teknik pengujian keabsahan data yang diberi nama dengan teknik pemeriksaan.[16] Karena dalam penelitian kualitatif menjaga keabsahan data yang diperoleh merupakan faktor yang utama. Maka dalam melakukan keabsahan data peneliti perlu memeriksa data kembali sebelum diproses dalam bentuk laporan yang disajikan. Agar tidak terjadi kesalahan, maka peneliti melakukan uji kredibilitas data. Menurut Sugiyono, dalam uji kredibilitas data terdapat empat macam cara,[17] yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi dan member chek. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode triangulasi dalam melakukan teknik validitas data.

Moloeng (2006:330) menjelaskan bahwa trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

[16] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hal 257

[17] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*. (Bandung : Alfabeta 2014) hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[18] Denzim dalam tulisan Prastowo membedakan teknik ini menjadi lima macam yaitu:[19]

1. Trianggulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.
2. Trianggulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Trianggulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
4. Trianggulasi penyidik yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan memanfaatkan pengamat lain untuk pengecekan derajat kepercayaan data.
5. Trianggulasi teori yaitu cara pemeriksaan kredibilitas data yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa data temuan penelitian.

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik, dan sumber data yang telah diperoleh.Namun dari penjelasan diatas penulis menggunakan triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Selain trianggulasi teknik

[18]Lexy J Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).
[19] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis juga menggunakan triangulasi sumber yang berarti peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.[20]

Peneliti menggabungkan semua hasil penelitian yang di dapat, dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan kata lain, triangulasi merupakan menguji keabsahan dari hasil penelitian dengan peneliti, metode, teori, dan sumber data.[21] Jika sudah dipastikan triangulasi memiliki hasil yang sama dari awal hingga akhir, maka data yang diperoleh dianggap kredibel. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap triangulasi data sebagai berikut:

1) Peneliti melakukan pengecekan tentang hasil dari pengamatan wawancara, maupun hasil data yang diperoleh dengan cara observasi dan dokumentasi.
2) Penulis meneliti apa yang dikatakan informan tentang Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan dengan mengecek data yang sudah ada apakah sesuai atau tidak.
3) Membandingkan pendapat atau perspektif informan satu dengan informan yang lain.Membandingkan wawancara dengan isi dokumen.

[20]Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014) 83
[21] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal.264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

a. Sejarah Kota Surabaya

Mendengar nama Kota Surabaya memang sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Selain dikenal sebagai kota pahlawan, Surabaya juga menjadi kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya mempunyai luas wilayah 33.451,14 hadengan jumlah penduduk 3.063.910 jiwa dan batasan wilayahnya dikelilingi beberapa daerah yaitu dari bagian Utara selat Madura, bagian Selatan yaitu Kabupaten Sidoarjo, bagian Barat Kabupaten Gresik, dan bagian Timur Selat Madura. Surabaya mempunyai total 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan.[1]

Kota Surabaya hingga kini mempunyai total 23 walikota mulai dari zaman penjajahan Belanda yaitu tahun 1916 hingga kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Mulai dari Mr. A. Meyroos tahun 1916, Ir. GJ Dijkerman pada tahun 1920, HI Bussemaker pada tahun 1929 hingga sekarang dijabat oleh Bu Risma sapaan akrab Tri Risma Harini. Berikut daftar walikota Surabaya:

[1] Profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2

Daftar Walikota Surabaya

No.	Nama	Dari	Sampai
1	Mr. A. Meyroos	1916	1920
2	Ir. GJ. Dijkerman	1920	1929
3	HI. Bussemaker	1929	1932
4	WH. Van Helsdinger	1932	1942
5	Radjamin Nasution	1942	1942
6	Takashi Ichiro	1942	1945
7	Radjamin Nasution	1945	1945
8	Mr. CJC. Becht	1945	1945
9	Mr. Indrakoesoma	1945	1945
10	Mr. Soerjadi	1945	1950
11	Doel Arnowo	1950	1952
12	Moestadjab Soemowidigdo	1952	1956
13	Istidjab Tcokrokoesoemo	1956	1958
14	R. Satrio Sastrodiredjo	1958	1964
15	Moerachman	1964	1965
16	Brigjen (purn) R. Soekotjo	1965	1974
17	Kol (purn) HR. Soeparno	1974	1979
18	Kol CPM Drs. Moehadji	1979	1984
19	Kol (purn) Dr. H Poernomo Kasidi	1984	1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20	Kol (purn) H Sunarto Sumoprawiro	1994	2002
21	Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd	2002	2005
22	Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd	2005	2010
23	Ir. Tri Rismaharini, MT	2010	Sekarang

Sumber: semampir-surabaya.kpt.web.id (daftar walikota Surabaya)

Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, banyak versi yang tercatat yang menjelaskan tentang sejarah Surabaya salah satunya seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan I, berangka 1358 M. Dalam prasasti tersebut terungkap bahwa Surabaya masih berupa desa ditepian sungai Brantas sebagai salah satu tempat penyeberangan penting sepanjang sungai Brantas. Juga tercantum dalam pujasastra Negara kertagama yang ditulis oleh prapanca tentang perjalanan pesiar baginda Hayam Wuruk pada tahun 1365 dalam pupuh XVII (bait ke-5, baris terakhir).[2]

Nama Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup dan mati Adipati Jayengrono dan Sawunggaling. Konon setelah mengalahkan tentara Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah kraton di ujung galuh, dan menempatkan Adipati Jayengrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama karena menguasai ilmu buaya, Jayengrono makin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayengrono diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu Sura. Adu kesaktian dilakukan di pinggir sungai kalimas dekat paneleh. Perkelahian

[2] www.kemendagri.go.id di akses pada tanggal 11 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adu kesaktian itu berlangsung selama tujuh hari tujuh malam dan berakhir dengan tragis, karena keduanya meninggal kehabisan tenaga.

Supaya tidak menimbulkan kesimpang-siuran dalam masyarakat karena banyaknya versi sejarah Surabaya, maka Walikotamadya kepala daerah tingkat II Surabaya yang dijabat oleh Bapak Soeparno, mengeluarkan surat keputusan Nomor: 64/WK/75 tentang penetapan hari jadi kota Surabaya. Surat keputusan tersebut menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai tanggal hari jadi kota Surabaya. Tanggal tersebut ditetapkan atas kesepakatan sekelompok sejarawan yang dibentuk oleh pemerintah kota bahwa nama Surabaya berasal dari kata "sura ing baya" yang berarti "keberanian menghadapi bahaya" diambil dari babak dikalahkannya pasukan Mongol oleh pasukan Jawa pimpinan Raden Wijaya pada tanggal 31 Mei 1293.[3]

Lambang Kota Surabaya yang berlaku sampai saat ini ditetapkan oleh DPRD Kota Besar Surabaya dengan putusan No. 34/DPRDS tanggal 19 Juni 1955, diperkuat dengan keputusan Presiden R.I No. 193 tahun 1956 tanggal 14 Desember 1956 yang berisi:

1. Lambang berbentuk perisai segi enam yang distilir, yang maksudnya melindungi kota Surabaya.
2. Lukisan tugu pahlawan melambangkan kepahlawanan putera-puteri Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan melawan kaum penjajah.

[3] www.kemendagri.go.id di akses pada tanggal 11 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lukisan ikan sura dan buaya yang berarti sura ing baya melambangkan sifat keberanian putera-puteri Surabaya yang tidak gentar menghadapi sesuatu bahaya.
4. Warna-warni biru, hitam, perak (putih) dan emas dibuat sejernih dan secemerlang mungkin, agar dengan demikian dihasilkan suatu lambang yang memuaskan.

b. Letak Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya terletak diantara $07^0$12' – $07^0$21' Lintang Selatan dan $112^0$36' – $112^0$54' Bujur Timur, merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Batas-batas wilayah kota Surabaya di bagian Utara terdapat Selat Madura, bagian Selatan Kabupaten Sidoarjo, bagian Timur Selat Madura, dan bagian barat Kabupaten Gresik. Sedangkan untuk topografi Kota Surabaya meliputi Kota pantai, dataran rendah antara 3-6 m di atas permukaan laut, dan daerah berbukit di Surabaya bagian selatan 20-30 m di atas permukaan laut.

Tabel 3

Batasan Wilayah Kota Surabaya

No.	Bagian	Batas Wilayah
1	Utara	Selat Madura
2	Selatan	Kabupaten Sidoarjo
3	Timur	Selat Madura
4	Barat	Kabupaten Gresik

Sumber: Profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Temperatur Kota Surabaya cukup panas, yaitu rata-rata $22,6^0$ – $34,1^0$, dengan tekanan udara rata-rata antara antara 1005,2 – 1013,9 milibar dan kelembaban antara 42% - 97%. Kecepatan angin rata-rata perjam mencapai 12 – 23 km, curah hujan rata-rata 120 – 190 mm. Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Surabaya terdiri atas jenis tanah alluvial dan Grumosol, pada jenis tanah alluvial terdiri atas 3 karakteristik yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua dan alluvial kelabu. Wilayah Kota Surabaya dibagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan, 1.405 RW, dan 9.271 RT. dengan luas wilayah 33.451,14 ha, dengan jumlah penduduk 3.063.910 jiwa. Untuk nama-nama Kecamatan adalah sebagai berikut:[4]

Tabel 4

Nama Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Genteng	5 Kelurahan
2	Gubeng	5 Kelurahan
3	Tegalsari	5 Kelurahan
4	Simokerto	5 Kelurahan
5	Tambaksari	6 Kelurahan
6	Gubeng	6 Kelurahan
7	Krembangan	5 Kelurahan
8	Semampir	5 Kelurahan

[4] Profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Pabean Cantian	5 Kelurahan
10	Wonokromo	6 Kelurahan
11	Sawahan	6 Kelurahan
12	Tandes	12 Kelurahan
13	Karangpilang	4 Kelurahan
14	Wonocolo	5 Kelurahan
15	Rungkut	6 Kelurahan
16	Sukolilo	7 Kelurahan
17	Kenjeran	4 Kelurahan
18	Benowo	5 Kelurahan
19	Lakarsantri	6 Kelurahan
20	Mulyorejo	6 Kelurahan
21	Tenggilis Mejoyo	5 Kelurahan
22	Gunung Anyar	4 Kelurahan
23	Jambangan	4 Kelurahan
24	Gayungan	4 Kelurahan
25	Wiyung	4 Kelurahan
26	Dukuh Pakis	4 Kelurahan
27	Asem Rowo	5 Kelurahan
28	Suko Manunggal	5 Kelurahan
29	Bulak	5 Kelurahan
30	Pakal	5 Kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

31	Sambi Kerep	4 Kelurahan

Sumber: Profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya

2. Gambaran Umum Kecamatan Kenjeran

Kenjeran adalah salah satu Kecamatan yang mempunyai tempat wisata yang dikenal dengan nama Pantai Ria Kenjeran. Secara geografis Kecamatan Kenjeran terletak di bagian pinggir kota Surabaya yaitu bagian Utara kota. Kecamatan ini bersebelahan dengan laut dan berbatasan dengan selat madura di sebelah Utara, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semampir, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bulak dan bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambaksari. Kecamatan Kenjeran ini terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Sidotopo Wetan, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kelurahan Tambak Wedi, dan Kelurahan Bulak Banteng.[5]

Hasil pendataan oleh BPS kota Surabaya diketahui bahwa kelurahan paling luas di Kecamatan Kenjeran adalah Kelurahan Bulak Banteng dengan luas 2,67 Km dengan presentase luas sebesar 35% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kenjeran, sedangkan kelurahan yang memiliki wilayah paling sempit adalah Kelurahan Tambak Wedi dengan luas 0,98 Km dengan presentase 13% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kenjeran. Untuk Kelurahan Sidotopo Wetan memiliki luas 1,66 Km dengan presentase 21%, sedangkan tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kelurahan Tanah Kali Kedinding memiliki luas wilayah 2,41 Km dengan presentase 31%. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Kenjeran memiliki ketinggian yang sama yaitu 2

[5] BPS Surabaya, *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2013* (Surabaya: BPS Surabaya, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meter, kecuali dengan Kelurahan Tambak Wedi yang memiliki ketinggian 1 meter.

3. Gambaran Umum Kelurahan Tanah Kali Kedinding

a. Luas Batasan dan Kondisi Geografis Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Menurut data yang diberikan oleh Ibu Anis selaku staf di Kelurahan Tanah Kali Kedinding kepada penulis, lokasi Kelurahan berada di jalan Mochammad Noer no. 350 tepat dipinggir jalan dan satu lokasi dengan kantor Kecamatan. Kelurahan Tanah Kali Kedinding mempunyai luas tanah 2.476 meter, dan memiliki 500 meter luas bangunan. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Tambak Wedi di sisi Utara, sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Kelurahan Kedung Cowek, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bulak, untuk bagian Barat bersebelahan dengan Kelurahan Sidotopo.[6]

Tabel 5

Batas Wilayah Kelurahan Tanah Kali Kedinding

No.	Bagian	Batas Wilayah
1	Utara	Tambak Wedi
2	Timur	Kedung Cowek
3	Selatan	Bulak
4	Barat	Sidotopo

Sumber: Data monografi Kelurahan Tanah Kali Kedinding

[6] Data monografi Kelurahan Tanah Kali Kedinding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kondisi geografis Kelurahan Tanah Kali Kedinding mempunyai ketinggian 1 meter dari permukaan laut dan memiliki suhu rata-rata 29°c hingga 30°c kondisi ini masih terbilang standart untuk tingkat suhu di perkotaan. Jarak lokasi Kelurahan menuju pusat pemerintah kota mencapai 7 Km. Dan jarak dari Kelurahan menuju pusat pemerintahan Provinsi mencapai 10 Km.[7]

b. Kependudukan Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Kelurahan Tanah Kali Kedinding terletak di bagian pinggir kota Surabaya berdekatan dengan laut teluk Madura. Kelurahan Tanah Kali Kedinding juga dekat dengan wisata alam di Surabaya yaitu pantai ria kenjeran. Menurut data yang diberikan Ibu Anis selaku staf Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kelurahan ini mempunyai total 12 RW (Rukun Warga) dan 143 RT (Rukun Tetangga), untuk penduduk tetap total ada 52.221 jiwadengan jumlah laki-laki yang memiliki kartu keluarga (KK) 10.714 jiwa dan 302 jiwa yang belum memiliki kartu keluarga, untuk jumlah perempuan yang memiliki kartu keluarga 3.673 jiwa dan yang belum mempunyai kartu keluarga 1.237 jiwa.[8]

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Keterangan
1	Jumlah laki-laki	25.432 orang

[7] Ibid.
[8] Data penduduk Kelurahan Tanah Kali Kedinding tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Jumlah perempuan	26.710 orang
3	Jumlah total	52.142 orang
4	Jumlah kepala keluarga	15.903 KK

Sumber: Data monografi Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Mayoritas di Kelurahan Tanah Kali Kedinding ini kebanyakan beragama Islam yaitu mencapai 49.956 jiwa, kemudian agama Khatolik sebagai agama dengan pemeluk terbanyak kedua setelah Islamyaitu mencapai 129 jiwa, terbanyak ke tiga yaitu Protestan 118 jiwa, kemudian Hindu 25 jiwa dan Budha 15 jiwa. Namun yang sangat disayangkan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding ini penduduknya masih banyak yang belum bekerja atau pengangguran, seperti data yang di dapat oleh penulis data warga yang belum bekerja mencapai 1.342 jiwa.Namun untuk pelajar tergolong banyak, total mahasiswa di Kelurahan Tanah Kali Kedinding mencapai 2.051 jiwa hingga tahun 2018 sekarang.

Tabel 7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	1.447 orang
2	Sekolah dasar	11.638 orang
3	SMP/SLTP	12.368 orang
4	SMU/SLTA	14.537 orang
5	Akademi	2.357 orang

Sumber: Data monografi Kelurahan Tanah Kali Kedinding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Karakteristik Perekonomian Penduduk Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Kelurahan Tanah Kali Kedinding sebagai Kelurahan yang tidak jauh dari laut namun mayoritas penduduknya kebanyakan bekerja sebagai pedagang, tercatat dalam data Kelurahan sebanyak 1.189 penduduk yang bekerja sebagai pedagang, adapun yang bekerja sebagai nelayan ada 115 penduduk, untuk pegawai negeri sipil tercatat ada 1.670 penduduk, sedangkan pensiunan atau purnawirawan sebanyak 354 pendudukm,anggota TNI 445 penduduk, anggota Polri 523 penduduk, guru dan dosen sebanyak 298 penduduk, pelajar atau mahasiswa 15.124 penduduk, sedangkan dokter hanya 2 penduduk. Namun untuk data yang belum bekerja menurut data Kelurahan Tanah Kali Kedinding tercatat ada 749 penduduk.

Walaupun Kelurahan Tanah Kali Kedinding dekat dengan laut namun itu tidak jadi mata pencaharian utama bagi warga setempat, ini dapat diketahui dari data yang telah dijelaskan diatas bahwa pekerja sebagai pedagang/wiraswasta dan pekerja swasta sangat mendominasi daripada nelayan. Berikut data karakteristik perekonomian penduduk Kelurahan Tanah Kali Kedinding:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 8

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	1.670 orang
2	TNI	445 orang
3	POLRI	523 orang
4	Swasta	11.354 orang
5	Pensiunan / purnawirawan	354 orang
6	Wiraswasta	14.100 orang
7	Tani / ternak	23 orang
8	Pelajar / mahasiswa	15.124 orang
9	Buruh tani	42 orang
10	Dagang	1.189 orang
11	Nelayan	115 orang
12	Ibu rumah tangga	2.672 orang
13	Guru / dosen	298 orang
14	Dokter	2 orang
15	Belum bekerja	749 orang

Sumber: monografi Kelurahan Tanah Kali Kedinding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana di Kelurahan Tanah Kali Kedinding ini cukup memadai. Ini bertujuan untuk memudahkan warga Kelurahan dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari seperti sekolah untuk anak-anak yang mencari ilmu, masjid untuk warga muslim yang ingin beribadah, dan tempat umum lainnya yang ada di sekitar Kelurahan. Berikut lebih jelasnya sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Tanah Kali Kedinding:

1) Sarana Keagamaan

Kelurahan Tanah Kali Kedinding mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ada 49.956 jiwa pemeluk agama Islam. Di kelurahan ini terdapat 29 masjid dan 39 mushola. Jumlah ini sangat cukup untuk memenuhi kegiatan beribadah warga muslim di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, dan sebagian masjid dan mushola juga dijadikan tempat rutinan untuk membaca surat yasiin dan tahlil setiap hari kamis, juga dijadikan tempat TPQ atau mengaji untuk anak-anak Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Namun selain masjid dan mushola, Kelurahan Tanah Kali Kedinding juga ada tempat beribadah pemeluk agama Kristen yang berjumlah 3 unit gereja.

2) Sarana Kesehatan

Untuk sarana kesehatan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding memang telah menyediakan beberapa sarana kesehatan demi kepedulian terhadap warga Kelurahannya, dalam data yang diberikan oleh staf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahanpada penulis total terdapat 6 bagian sarana kesehatan yang terdiri dari 3 unit rumah sakit bersalin, 10 unit poliklinik atau balai pelayanan masyarakat, 12 unitapotik, 39 unit posyandu, 1 unit puskesmasn dan 1 unit puskesmas pembantu.

3) Sarana Pendidikan Formal

Sarana pendidikan formal yang terbanyak di Kelurhan Tanah Kali Kedinding adalah TK atau Taman Kanak-Kanak total sebanyak 21 unit, kemudian sekolah SD atau sederajat total ada 9 unit, kelompok bermain total ada 6 unit, SMP atau sederajat total ada 2 unit, SMA atau sederajat total ada 1 unit. Sedangkan untuk perguruan tinggi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding masih belum ada.

4) Sarana Pendidikan Non Formal

Untuk sarana pendidikan non formal di Kelurahan Tanah Kali Kedinding terdapat satu unit pondok pesantren yang kurang lebih berukuran 3 hektare menurut warga sekitar. Pondok ini telah dikenal di kota surabaya bahkan di Jawa Timur yaitu pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah yang di asuh oleh KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqi atau biasa dikenal dengan panggilan Kyai Asrori yang merupakan putera dari Kyai Utsman Al-Ishaqi. Pondok ini berlokasi di jl. Kedinding Lor no. 99 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, kota Surabaya.

5) Sarana Olahraga

Warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding mempunyai beragam hobi olahraga mulai dari hobi tenis meja, bola voli, dan juga dan sepak bola.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sarana yang terbanyak yang tersedia yaitu lapangan tenis meja total ada 6 unit, kemudian lapangan voli ada 4 unit, untuk lapangan sepak bola hanya ada 1 unit, sedangkan tempat fitnes atau sanggar senam juga ada yaitu 2 unit.

6) Sarana Kebudayaan

Di Kelurahan Tanah Kali Kedinding juga tertdapat sarana kebudayaan. Demi mengembangkan bakat dan seni warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding didirikanlah gedung kesenian walau hanya ada satu buah gedung namun cukup untuk mengembangkan seni warga Kelurahan. Dan juga terdapat gedung bioskop yang total hanya berjumlah 1 buah gedung.

7) Sarana Panti Sosial

Kepedulian Kelurahan Tanah Kali Kedinding dalam hal sosial tidak diragukan lagi, hal ini dapat dilihat sarana panti sosial di Kelurahan ini total berjumlah 7 buah panti asuhan. Untuk menampung anak-anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya dan tidak terurus lagi, ini bertujuan agar mereka tetap mendapatkan pendidikan aqidah dan pendidikan umum yang layak dari panti asuhan tersebut.

8) Sarana Perhubungan

Sarana perubungan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yang tercatat dalam data kantor kelurahan ada satu yaitu jembatan. Jembatan ini adalah jembatan yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat lain yang terpisah oleh sungai kali tebu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Sarana Komunikasi

Untuk sarana komunikasi di seluruh Kelurahan Tanah Kali Kedinding dalam data yang sah menurut Kelurahan ada lima sarana mulai dari televisi umum berjumlah 12 buah, pemilikan pesawat telepon berjumlah 124 buah, pemilikan pesawat televisi berjumlah 12.732 buah, pemilikan pesawat radio berjumlah 1.451 buah, dan pemilikan antena parabola berjumlah 8 buah.

10) Alat Transportasi

Dalam data yang diberikan oleh pihak Kelurahan kepada penulis untuk alat transportasi yang tercatat di seluruh Kelurahan Tanah Kali Kedinding ada 7 model transport mulai dari sepeda ada 2.576 buah, gerobak ada 45 buah, becak ada 34 buah, sepeda motor yang terbanyak total ada 24.100 buah, mikrolet 4 buah, bus umum 1 buah, kemudian mobil pribadi ada 58 buah.

11) Sarana dan Prasarana Pengairan

Sebagai Kelurahan yang memiliki aliran sungai berukuran sangat luas dan aliran sungai terakhir untuk diarahkan ke laut, Kelurahan Tanah Kali Kedinding mempunyai sarana pengairan yaitu gorong-gorong. Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air baik untuk saluran irigasi atau pembuangan yang melewati bawah jalan. Total gorong-gorong di Kelurahan Tanah Kali Kedinding menurut data yang di dapat penulis ada 10 buah gorong-gorong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) Penyebaran Industri

Terakhir menurut data dari Kelurahan Tanah Kali Kedinding adalah penyebaran industri, penyebaran industri ada empat macam mulai dari besar, sedang, kecil hingga penyebaran industri dari rumah tangga. Untuk penyebaran industri besar yaitu 1 buah, sedang 42 buah, kecil 19 buah, sedangkan penyebaran industri dari rumah tangga 123 buah.

e. Kondisi Sosial Keagamaan Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding seperti yang sudah dijelaskan di atas mayoritas keagamaan adalah pemeluk agama Islam. Ini dapat dilihat dari data Kelurahan warga yang beragama Islam yaitu mencapai 49.956 jiwa, kemudian agama Katolik sebagai agama dengan pemeluk terbanyak kedua setelah Islamyaitu mencapai 129 jiwa, terbanyak ke tiga yaitu Protestan 118 jiwa, kemudian Hindu 25 jiwa dan Budha 15 jiwa. Namun meskipun banyak umat beragama itu tidak jadi masalah bagi warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, warga disana masih tetap rukun dan saling menghargai antar umat beragama.

Tabel 9

Jumlah Penduduk Menurut Keagamaan

No.	Agama	Jumlah
1	Agama Islam	49.956 orang
2	Agama Kristen	2.587 orang
3	Agama Katholik	129 orang
4	Agama Hindu	25 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Agama Budha	15 orang

Sumber: Data monografi Kelurahan Tanah Kali Kedinding

f. Kondisi Interaksi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Penduduk Kelurahan Tanah Kali Kedinding kebanyakan dari etnis Jawa dan Madura. Bahkan di di Kelurahan Tanah Kali Kedinding ada perkumpulan etnis Madura. Namun di sini tidak pernah membedakan satu sama lain, walau pun berbeda etnis sekalipun tidak memecah belah tali silaturahmi antar perbedaan etnis. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang selalu berjalan lancar seperti acara tahlilan dari orang-orang Islam dan acara beribadah umat kristen tiap minggu yang diadakan di gereja berjalan dengan aman. Ada beberapa lembaga keagamaan menurut data Kelurahan Tanah Kali Kedinding yaitu majelis taklim yang berjumlah 23 kelompok, majelis gereja berjumlah 3 kelompok, untuk remaja masjid ada 9 kelompok dengan total 180 orang, dan remaja kristen ada 1 kelompok dengan total 25 orang, remaja katholik juga ada perkumpulannya yang beranggotakan 12 orang. Semua lembaga keagamaan ini tetap rukun walau berbeda keyakinan.

g. Struktur Organisasi Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Susunan keorganisasian Kelurahan Tanah Kali Kedinding total ada 14 anggota dan terdiri dari 5 bagian mulai dari bapak Mudjiyanto sebagai kepala Kelurahan, Sudja'un sebagai ketua Sekretaris Kelurahan, Conny Setyawan sebagai ketua Kasi Tata Pemerintahan, Agus Sugianto sebagai ketua Kasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentraman Ketertiban Umum & Pembangunan, dan Anis Pudjiastutik sebagai ketua Kasi Kesejahteraan Rakyat & Perekonomian.

1. Lurah

   Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas:

   a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
   b. pemberdayaan masyarakat.
   c. pelayanan masyarakat.
   d. penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
   e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
   f. pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

2. Sekretaris Kelurahan

   Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kelurahan. Fungsi:

   a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan
   b. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga.
   c. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kelurahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Kasi tata pemerintahan

Kasi tata pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan umum. Fungsinya:

a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum.
b. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi dan kependudukan dan catatan sipil.
c. Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan.
d. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

4. Kasi ketentraman, ketertiban umum dan pembangunan

Kasi ini mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup. Fungsinya:

a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat.
b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan.
d. Fasilitas peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
e. Fasilitas peningkatan kelestarian lingkungan hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Fasilitas penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan.

g. Fasilitas program pembangunan pengentasan kemiskinan.

5. Kasi kesejahteraan rakyat dan perekonomian

Kasi ini mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuan dan pelayanan sosial. Fungis:

a. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial.

b. Pelayanan pepada masyarakat bidang sosial.

c. Fasilitas pembinaan sosial budaya masyarakat.

d. Fasilitas program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya.

e. Fasilitas pembinaan kepemudaan, kesenian, olahraga, dan pemberdayaan perempuan.

f. Fasilitas pembinaan masyarakat rentan sosial.

Berikut gambaran susunan keorganisasian Kelurahan Tanah Kali Kedinding:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

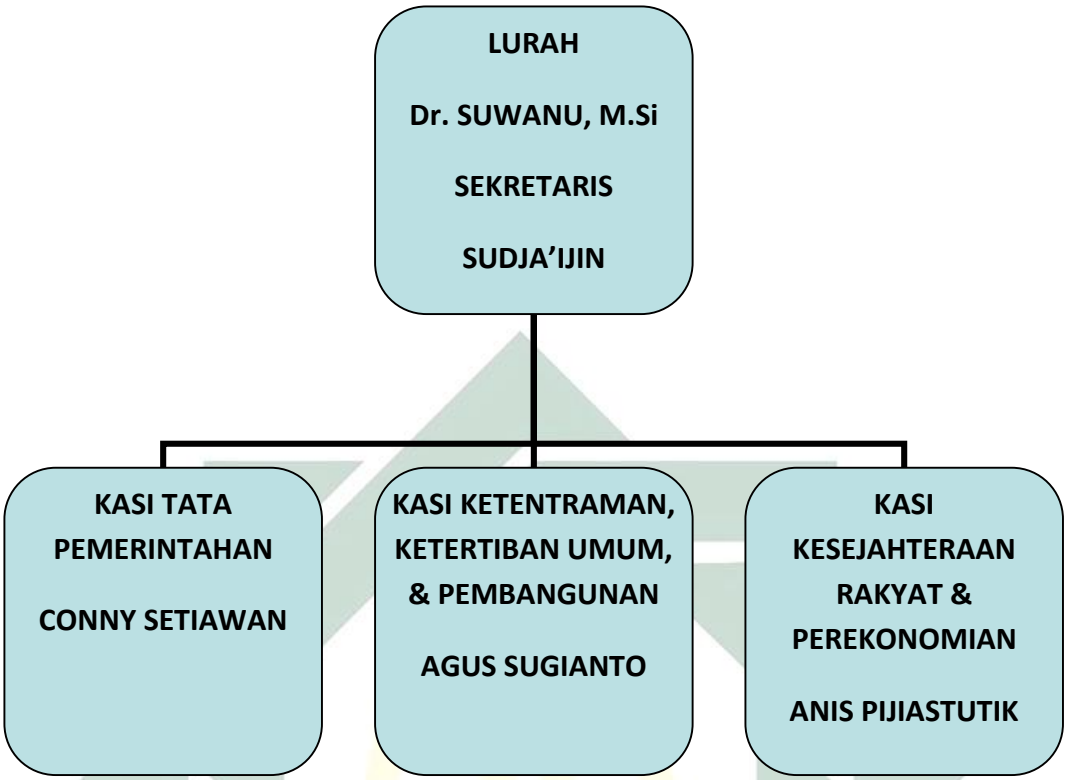

6. Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya

a. Pengertian Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantif atau isi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian akhir. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.[9] Lebih mudahnya pengelolaan adalah proses dari suatu tindakan untuk dijadikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Namun dalam hal ini yang dimaksud adalah

[9] Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988) hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan sampah, jadi proses pengelolaan yang di kelola Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya mulai dari kelurahan hingga tempat pembuangan akhir.

Sedangkan bersih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas dari kotoran. contoh air bersih bening tidak keruh, tidak tercemar sesuatu yang mengotori. Disini dapat dipahami bahwa bersih adalah terbebas dari kotoran dan dibutuhkan upaya dari manusia sendiri untuk tetap menjaga kebersihan. Dalam ajaran Islam pun kebersihan ini sangat penting seperti yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW yaitu *Annadhofatu Minal Iman* yang artinya kebersihan sebagian dari iman.

b. Fasilitas dan Alur Pengelolaan Sampah Kota Surabaya

Pengelolaan sampah di kota Surabaya secara struktural dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) kota Surabaya, mengingat semakin bertambahnya penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya sampah. Namun hal ini sebenarnya tidak lepas dari partisipasi masyarakat Surabaya. Perlunya kerja sama antara Pemerintah Kota dengan warga sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) kota Surabaya telah menyediakan fasilitas untuk memudahkan dalam urusan mengelola sampah. Adapun fasilitas tersebut:[10]

1. TPA (Tempat Pembuangan Akhir): 1 unit
2. IPLT: 1 unit

[10] Profil Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. TPS/DEPO: 188 unit
4. Rumah kompos: 26 unit
5. Kendaraan angkut sampah compactor: 47 unit
6. Kendaraan angkut sampah dump truck: 30 unit
7. Kendaraan angkut sampah armroll 6 m3: 11 unit
8. Kendaraan angkut sampah armroll 8 m3: 23 unit
9. Kendaraan angkut sampah armroll 14 m3: 66 unit
10. Alat berat excavator: 7 unit
11. Alat berat buldozer: 5 unit
12. Alat berat wheel loader: 1 unit
13. Alat berat backhoe loader: 1 unit
14. Alat berat forklift: 1 unit
15. Mini hydraulic excavator: 2 unit
16. Pedestrian scrubber dryer: 5 unit
17. Road sweeper: 2 unit
18. Toilet mobil: 7 unit
19. Portable toilet: 20
20. Mesin pencacah sampah: 31 unit
21. Mesin pencacah sampah mobile: 1 unit
22. Truck tanki air: 41 unit
23. Truck sky walker: 16 unit
24. Truck bak: 3 unit
25. Mobil pick up: 58 unit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

26. Sepeda motor roda 3: 31 unit
27. Tempat sampah (ban karet) terbagi: 639 unit
28. Tempat sampah besi berstiker terbagi: 3 unit
29. Tempat sampah biru & orange terbagi: 110 unit
30. Tempat sampah dorong 120 Lt. Terbagi: 161 unit
31. Tong bin beroda Uk. 100 terbagi: 100 unit
32. Tong bin beroda Uk. 240 terbagi: 2 unit
33. Gerobak sampah terbagi: 80+ unit
34. Keranjang takakura terbagi: 553 unit
35. Tong komposter terbagi: 358 unit
36. Mobil toilet: 1 unit
37. Truck tanki tinja: 2 unit
38. Truck self loader: 2 unit
39. Pick up sky walker: 1 unit

Dalam profil yang diberikan oleh Bapak Eko selaku staf Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menyebutkan bahwa total timbulan sampah di kota Surabaya mencapai 2.913 ton/hari, jumlah sampah yang masuk TPA rata-rata kurang lebih 1.400 ton/hari. Berbagai karakteristik sampah, namun yang paling mendominasi adalah sampah organik yaitu sebesar 54,31% dan sisanya merupakan sampah anorganik seperti plastik, logam, gelas/kaca, kertas.[11]

[11] *ibid, hal* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pengelolaan sampah pemerintah juga melibatkan peran serta masyarakat untuk mengelola lingkungan secara mandiri berbasis komunitas dengan mengelola sampah dari sumbernya dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan hasil sampah kering ditabung di bank sampah sedangkan sampah basah dijadikan kompos. Berdasar pedoman umum 3R permukiman yang mengacu pada Peremen PU Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan pengelolaan persampahan. Berikut penjelasan mengenai 3R:

a. *Reduce:* upaya mengurangi volume sampah. Disebut juga redaksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sebelum sampah dihasilkan. Contoh, merubah pola hidup konsumtif yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat, efisien dan sedikit sampah, namun diperlukan kesadaran masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
b. *Reuse:* upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan bentuk untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Contoh, wadah bekas cat dipergunakan kembali sebagai tempat sampah, menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refil.
c. *Recycle:* upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat. Contoh, koran bekas menjadi patung miniatur surabaya, botol bekas air mineral menjadi tempat pensil, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan sampah dan kebersihan di Surabaya dilaksanakan oleh petugas tiap-tiap rayon yang tersebar di seluruh Kecamatan. Menurut Bapak Joko selaku Koordinator Yustisi menjelaskan bahwa proses kebersihan dimulai dari perwakilan rayon yang berada di Kecamatan tersebut. Sebagai contoh sungai kali tebu yang bertempat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yang menangani adalah rayon kenjeran. Sungai kali tebu ini proses peengelolaan sampah dan kebersihannya melalui dua cara yaitu cara *mechanical screen* dan cara manual. *Mechanical screen* adalah cara modern menggunakan alat untuk memungut sampah yang mengalir di sungai. Alat ini membentang pada bagian hilir sungai agar sampah-sampah yang mengalir mulai dari hulu berkumpul ke bagian hilir kemudian sampah dipungut menggunakan alat tersebut. Sedangkan cara manual yaitu menggunakan kayu yang dibentangkan di sungai dengan tujuan agar sampah-sampah yang mengalir di sungai terhalang oleh bentangan kayu tersebut kemudian ditarik dan dipungut sampahnya. Setelah sampah di sungai berhasil diangkat dan dikumpulkan, langkah berikutnya sampah tersebut di kirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo menggunakan truck sampah yang telah disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1

Alat Mechanical Screen

Sumber: sungai kali tebu, Kelurahan Tanah Kali Kedinding

TPA Benowo terletak di wilayah Surabaya Barat, dengan luas lahan kurang lebih 37,4 Ha. TPA Benowo lokasinya meliputi dua wilayah Kelurahan, yaitu Kelurahan Romo Kalisari, Kecamatan Benowo dan Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Surabaya. Berjarak 20 Km dari pusat kota surabaya dan 5 Km dari batas Kabupaten Gresik (sungai lamong). TPA benowo berbatasan dengan stadion Bung Tomo di sebelah Selatan. TPA Benowo ini adalah milik pemerintah, mulai beroperasi pada bulan November 2001. TPA Benowo inilah yang menampung sampah dari seluruh wilayah Surabaya. Awalnya TPA Benowo menggunakan sistem pengelolaan *controlled landfill*, namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah maka TPA Benowo dikembangkan dengan menggunakan sistem pengelolaan *santary landfill* dan grasifikasi menghasilkan energi listrik (*waste to energy*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penyajian Data

1. Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara beserta dokumentasi. penulis akan menjabarkan hasil yang di dapat selama berada di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Lemieux (1995:7) menyatakan kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur.[12]

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Wali Kota Surabaya, yang bertujuan untuk menyelasaikan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan. Mengacu dari pendapat di atas, sama seperti yang tertulis di awal pembukaan perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak

[12] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di kota Surabaya.[13]

Ada beberapa tahapan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Poin-poin tahapan dalam Perda tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan, HAK, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Berikut penjelasannya:

a. Menimbang

Yang dimaksud menimbang adalah alasan awal mengapa dibentuk Perda tersebut. Dalam pertimbangan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan adalah bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

b. Ruang Lingkup Peraturan

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas ekonomi.

[13] Surabaya, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan kebersihan, perda No. 5 tahun 2014, menimbang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. HAK

Setiap orang atau badan berhak:

1. Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.
2. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampahl.
3. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.
5. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

d. Larangan

Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan di tempat umum lainnya.

e. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat berupa:

1. Teguran.
2. Peringatan tertulis.
3. Paksaan pemeriksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Uang paksa.
5. Pencabutan izin.
6. Penutupan usaha/kegiatan.

f. Ketentuan Pidana

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 33 yang menjelaskan tentang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan di tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Bapak Eko selaku staf Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) mengungkapkan:

> ya jadi gini mas, caranya nyusun peraturan daerah itu ada inisiatif dari pemerintah daerah atau inisiatif dari dewan pemerintah daerah, jadi misalnya ada permasalahan sampah seperti perda Nomor 5 Tahun 2014 ini inisiatif dari pemerintah kota Surabaya. Untuk mengatur bagaimana pengelolaan kebersihan dan persampahan di kota surabaya itu. Makanya diperlukan peraturan daerah, nah dasar hukumnya itu sesuai dengan peraturan diatasnya. Jadi peraturan daerah ini dibentuk karena kebutuhan dari daerah tersebut, karena kebutuhan dari kota surabaya untuk mengatur pengelolaan sampah di kota Surabaya. Dasar hukumnya mengacu pada peraturan diatasnya, peraturan dari Propinsi, peraturan dari Presiden, peraturan dari undang-undang. Seperti itu mas.[14]

Jadi secara terstruktur perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan

[14] Wawancara Bapak Eko selaku staf Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampah yang terjadi di Surabaya, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola lebih baik.

Setelah merancang peraturan daerah yang di tujukan untuk menertibkan pengelolaan sampah dan kebersihan. Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan. Dalam sebuah kebijakan publik, implementasi ini sangat penting karena kalau tidak di implementasikan, maka akan sia-sia pembuatan kebijakan tersebut karena tidak pernah terealisasikan di masyarakat, akibatnya permasalahan tidak akan terpecahkan. Seperti yang di jelaskan oleh Samodra Wibawa (1994) implementasi adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* bagi masyarakat.[15] Jadi implementasi mempunyai peran penting setelah terbentuknya sebuah kebijakan.

Dalam pandangan masyarakat sekitar, sungai kali tebu kondisinya sangat miris. Hal ini dapat dilihat langsung kondisi sungai dari zaman dahulu hingga sekarang kebersihannya terus menurun karena selalu di padati dengan tumpukan sampah. Salah satu penyebabnya karena sungai kali tebu bagian hilir, bagian hilir adalah bagian paling akhir sungai dan akan di alirkan ke laut. Tetapi sampah yang berada di sungai kali tebu ini tidak hanya berasal dari aliran sungai sebelumnya yaitu sungai dari Rangkah, sungai dari Tambaksari, dan sungai-sungai lainnya, melainkan juga dari warga setempat yang masih buang sampah sembarangan. Dari pihak Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan

[15] Samodra wibawa, *evaluasi kebijakan publik* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak komunitas peduli kali tebu mengungkapkan hal yang sama mengenai kondisi sungai kali tebu ini seperti dikutip dari wawancara berikut:

> kalo menurut kami dari instansi pemerintahan kondisinya sangat kotor walaupun usaha melakukan pembersihan tapi masih ada masyarakat yang kurang sadar tentang arti kebersihan walaupun sudah di tetapkan akan dijadikan ikon sebagian dari kota surabaya.[16]
>
> dulu waktu ketika beberapa tahun silam kali tebu itu sangat indah, bahkan di kali ini dulu airnya sempet untuk digunakan kereta-kereta api, dan lain-lain semua mengambil sumber utama di era itu adalah di kali ini, dan ketika beberapa tahun silam keadaan di sini hampir sangat mengerikan, sampean bisa melihat sendiri di bantaran kali begitu banyak sampah yang jika anda pengen nyeberang, anda bisa nyebrang di situ saking banyaknya tumpukan sampah itu.[17]

Dari beberapa pernyataan di atas terlihat jelas bahwa sungai kali tebu mengalami penurunan yang sangat drastis dari zaman dulu hingga sekarang. Zaman dahulu yang biasanya sungai digunakan untuk mencuci kendaraan, namun sekarang sudah tidak bisa digunakan karena airnya yang sudah tercemar bahkan akan menimbulkan penyakit jika digunakan untuk mencuci.

[16] Wawancara ibu Anis selaku staf di Kelurahan Tanah Kali Kedinding
[17] Wawancara Cahyo selaku ketua komunitas peduli kali tebu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2

Pengelolaan Sampah Dengan Cara Manual

Sumber: Sungai kali tebu, kelurahan Tanah Kali Kedinding

Dalam mengimplementasikan perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) kota Surabaya menjelaskan telah melakukan sebaik-baiknya. Ini seperti yang di ungkapkan bapak Eko selaku staf di dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau menjelaskan:

> yaaaa, jadi kalo perda itu semua harus melaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing. Kalo kita pemerintah daerah ya kita melakukan pengawasan, monitoring, melakukan kebijakan-kebijakan yang ada di perda ini. Ya koordinasinya disamping kita kedalam sendiri sesama dinas yang ada di kota surabaya, tapi kita juga bersosialisasi ke seluruh warga, kita bisa ke kelurahan, ke kecamatan, kita bisa ke dinas lain yang terkait untuk melaksanakan pelaksanaan ini.[18]

[18] Wawancara Bapak Eko selaku staf Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ungkapan bapak Eko, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau melakukan monitoring, pengawasan, dan melakukan sesuai yang tertulis di perda. Selain itu pihak Dinas juga turun ke lapangan dengan tujuan langsung bersosialisasi dengan warga setempat. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Eko selaku staf di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, bapak Indra sekalu staf di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Saluran Pematusan menjelaskan cara mengimplementasikan perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di sungai kali tebu sebagai berikut:

> biasanya kita dibantu sama temen-temen nganu pak bidang stariat, tim yustisi, kitakan bagian kebersihan ya pak, ya jadi kita kerja sama dengan teman stariat, teman yustisi. Nah kalo teman stariat ini biasanya kita dibantu untuk fasilitator fasilitas perda, agar orang tidak buang sampah di sungai itu, kalo koordinasi kita dengan tim yustisi biasanya kita koordinasi tentang penindakan jadi kalo kita menemui orang yang buang sampah sembarangan di sungai kali tebu, itu kita foto atau orangnya kita tahan untuk di serahkan ke tim yustisi agar di tindak untuk menegakkan perda ini.[19]

Dari kutipan wawancara diatas dapat dipahami bapak Indra selaku staf UPTD kota Surabaya dalam melakukan tugasnya selalu dibantu oleh tim yustisi. Tim yustisi ini sebagai penegak keadilan di Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Ini tujuannya agar petugas tidak sia-sia membersihkan daerah sungai kali tebu, namun agar warga yang buang sampah sembarangan terkena sanksi dan beripikir dua kali jika ingin buang sampah sembarangan lagi. Selain itu petugas juga bersosialisasi kepada warga setempat untuk memberi arahan agar tidak buang sampah sembarangan, memasang spanduk himbauan perda bahwa yang melanggar perda akan dikenakan sanksi dan

[19] Wawancara Bapak Indra selaku staf di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Saluran Pematusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan tempat sampah yang di taruh di bantaran sungai kali tebu. Jika dipahami dari beberapa kutipan wawancara di atas terlihat jelas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) kota Surabaya telah bekerja sebaik mungkin. Dan saling bekerja sama antara tim Yustisi, UPTD, Stariat, dan tim rayon sebagai petugas kebersihan.

Gambar 3

Tempat Sampah yang disediakan Oleh DKRTH

Sumber: Sampah bantaran kali tebu, Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Bermula dari rasa prihatinnya warga setempat maka terlahirlah komunitas peduli kali tebu. Komunitas peduli kali tebu ini dalam jangka pendek bertujuan untuk menjembatani suara warga setempat agar di dengar oleh pemerintah. Komunitas ini melaporkan rasa prihatinnya ke Kelurahan Tanah Kali Kedinding, namun oleh pihak Kelurahan di respon baik. Kemudian komunitas ini melakukan aksi demo ke kantor DPRD Surabaya karena merasa Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berjalan semestinya. dan hasilnya pemerintah kota Surabaya langsung turun ke lokasi atas kejadian tersebut untuk memantau secara langsung kondisi sungai kali tebu. Dengan demikianlah maka di turunkan langsung petugas Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau untuk membersihkan sungai secara menyeluruh bersama dengan komunitas peduli kali tebu. Seperti dikutip dari perkataan Bapak Indra yang mengakui bahwa dibantu oleh komunitas peduli kali tebu:

> eeee. Kelompok masyarakat ada di sana, komunitas peduli kali tebu itu ada, trus satu lagi komunitas nol sampah, terakhir kemarin itu pembersihan di kapas madya. Selama ini kita dibantu untuk soslalisasi di sana sama temen-temen komunitas peduli kali tebu ini dan juga menyampaikan informasi kalo ada orang yang buang sampah di sini dikirimi foto trus sama ngasih tahu titik lokasi supaya kita bisa memasangkan spanduk himbauan.[20]

Gambar 4

Spanduk Himbauan Perda

Sumber: Spanduk himbauan Dinas Kebersihan

[20] Wawancara Bapak Indra staf UPTD Saluran Pematusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pihak komunitas ini menilai negatif pihak pemerintah mengenai implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengeolaan Sampah dan Kebersihan. Mereka menganggap pemerintah terlambat dalam menangani permasalahan di sungai kali tebu. Mengapa harus ada gerakan dari komunitas dulu baru pemerintah mau bekerja? Mengapa tidak dari dulu sebelum terbentuknya komunitas ini. Pernyataan ini seperti dikutip ketua komunitas peduli kali tebu:

> kalo menurut saya sendiri kinerja dari DKP itu jelas kurang, karena adanya komunitas ini kenapa kita harus berkoar-koar dulu baru dia memperhatikan sungai, kenapa tidak dari dulu? Dan yang saya herankan kenapa kok sampai mendapatkan penghargaan kota bersih,kota indah? Padahal di sini kalo tim survei bisa nilai di sini, pasti surabaya tidak akan mendapatkan piagam itu. Jadi menurut saya itu sangat kurang. Dan disini kan yang diterapkan di pasal itu ada tindakan, lah saya belum pernah melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim Yustisi itu tadi.[21]

Senada dengan yang diucapkan oleh Cahyo selaku ketua komunitas peduli kali tebu, bapak Budi juga berpendapat sama selaku aktivis dan pembina komunitas peduli kali tebu. Yang mengatakan sebagai berikut:

> nah di dalam perda itu kan didalamnya ada tindakan Yustisi dan denda juga bahkan masyarakat yang buang sampah sembarangan kan. Tapi fakta dilapangan bahwa implementasi pelaksanaan perda Nomor: 5 Tahun 2014 itu sangat tidak maksimal, kalo saya boleh mengatakan bahwa pelaksanaan perda itu hanya sebatas perda, kemudian implementasinya untuk ke masyarakat dan juga untuk sosialisasinya ke masyarakat sangat kurang sekali. Okelah DKP memasang spanduk himbauan tentang perda itu kemudian sanksi dari perda itu, tapi faktanya kalo saya boleh mengatakan keberhasilan perda itu sangat minim sekali. Artinya apa, sebelum menjadi perdakan ada raperda, rancangan peraturan daerah kemudian sebagai kontrol kebijakan pemerintah daerah kan DPR, DPR mngesahkan perda itu sendiri, tapi hanya

[21] Wawancara Cahyo ketua komunitas peduli kali tebu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sebatas itu, fungsi kontrol dari DPRD kota Surabaya sendiri terkait implementasi dan pelaksanaan perda itu sangat kurang sekali. Artinya saya berani mengatakan bahwa kepedulian DPRD kota Surabaya dalam mengawasi pelaksanaan perda Nomor: 5 tahun 2014 sangat minim sekali.[22]

Dari kutipan diatas terlihat jelas komunitas peduli kali tebu menilai negatif pihak pemerintah, terlebih tim Yustisi dan DPRD kota Surabaya. Peran Yustisi memang sangat penting dalam suatu penerapan kebijakan publik. Karena tugas dari tim Yustisi adalah menegakkan keadilan perda, dan memberi sanksi berupa hukuman yang berlaku sesuai yang tertulis di perda tersebut. Dengan demikian warga yang melanggar akan merasa takut jika ingin melanggar peraturan lagi. Selain Yustisi, pak Budi juga menyayangkan sikap DPRD yang melepas begitu saja mengenai perda itu. Jadi seakan-akan setelah terbuatnya perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan langsung di lepas begitu saja, pak Budi menilai fungsi kontrol dari perda itu sangat minim sekali. Demikian penyajian data mengenai implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan menurut informan yang penulis wawancarai melalui pihak Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) kota Surabaya, staf Kelurahan Tanah Kali Kedinding, komunitas peduli kali tebu, dan warga sekitar.

[22] Wawancara Bapak Budi aktivis dan pembina komunitas peduli kali tebu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Mirian Budiarjo (2008) menjelaskan kebijakan publik adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.[23] Jika dipahami dari ungkapan diatas dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini akan di fokuskan pada perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Namun dalam menerapkan kebijakan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, karena terdapat beberapa faktor penentu yang dapat mempengaruhinya yaitu faktor penentu pemenuhan kebijakan dan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan. Faktor pemenuhan kebijakan terdiri dari respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, adanya sanksi hukum, adanya kepentingan publik, adanya kepentingan pribadi, dan masalah waktu. Sedangkan faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan terdiri dari adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tidak adanya kepastian hukum, adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, dan adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum.[24]

Mengacu dari penjelelasan Agustino diatas, terlihat jelas bahwa ada beberapa penghambat dalam mengimplementasikan perda. Dalam perda

[23] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
[24] Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008) 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan kebersihan ini beberapa informan yang kami wawancarai telah menjelaskan penyebab dari terhalangnya menjaga kebersihan sungai. Hal ini di katakan oleh Ibu Anis selaku staf Kelurahan Tanah Kali Kedinding:

> dalam pengambilan sampah walau pun sudah dikasih alat sebagai penahan sampah, kalo dimusim kemarau sih gak ada masalah tapi takutnya di saat musim hujan kan air meluber otomatis sampah yang sudah di tahan dengan ee.. apa namanya seperti ee.. seperti bambu yang panjang dari ujung ke ujung itu akan sia-sia, ikut dengan air yang meluber itu tadi nah saringan terakhirnya finish nya yaitu ada di pintu air itu jadi dari petugas sendiri tidak bisa mengambil, hanya mengandalkan yang ada di pintu air gitu. Karena di sepanjang kali tebu ada dari ujung rangkah sampe pintu air itu ada tiga tahapan di daerah pogot jaya ada, trus di sini tanah merah rw 04 ada, daerah perbatasan tanah kali kedinding dan bulak itu ada seperti bambu yang di ikat untuk menahan sampah.[25]

Kesulitan dalam menjaga kebersihan sungai kali tebu dalam penjelasan ibu Anis adalah ketika hujan deras yang mengakibatkan banjir, maka alat penahan sampah yang telah di sediakan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) kota Surabaya jadi tidak berfungsi lagi. Karena aliran air jadi tinggi dan penghalang sampah tidak dapan menjangkau sampah yang lewat. Namun dari pihak Dinas juga menjelaskan mengenai kesulitan dalam menjaga sungai kali tebu tersebut.

> jadi secara umum surabaya kan kotanya besar, kita nggak ngomong kali tebu aja, yang diawasi itu banyak, yang dimonitoring itu banyak, warganya juga tidak semua asli dari surabaya, ada warga yang tidak ber KTP surabaya, itu hambatannya mungkin jumlah personil kita untuk melakukan tindakan kalo misal ada pelanggaran itu SDM dari dinas untuk meng cover keseluruhan wilayah. Misalnya orang lima untuk sesurabaya ya itu kan tidak

[25] Wawancara Bu Anis staf Kelurahan Tanah Kali Kedinding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> cukup mas, tapi kita memaksimalkan jumlah sumberdaya manusia yang ada[26]

Jika melihat dari perkataan Bapak Eko, penyebab terhambatnya dalam mengimplementasikan perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan adalah faktor SDM. Minimnya SDM dan terlalu banyaknya pengelolaan sampah yang harus di pantau selain sungai kali tebu. Selain itu karena Surabaya sebagai kota yang banyak pendatang dari daerah lain, maka banyak orang pendatang yang belum mengetahui tentang peraturan kebersihan di kota Surabaya. Jadi pihak Dinas kesulitan dalam menjaga sungai tersebut. Selain bapak Eko, dari pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Saluran Pematusan juga menjelaskan namun dengan penyebab yang berbeda.

> hambatannya kalo kita kan sampean kali tebu itu ngambilnya dari jembatan pogot, sementara kalo sungai itu kan dari hulu ke hilir, jadi bener kalo sampah dari jembatan pogot ini bersih, tapi sampahnya dari belakang aliran-aliran sebelumnya ini. Jadi kalo hambatannya kita sosialisasinya harus dari belakang yaitu hulunya supaya sampahnya gak seberapa banyak. Jadi sosialisasinya dari jembatan pogot kebelakang itu.[27]

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya dalam mengimplementasikan perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan kesulitan ini bermula dari aliran-aliran sungai sebelumnya yaitu dari hulunya. Karena sampah yang dari hulu mengalir ke hilir jadi yang terkena dampak buruknya adalah sungai kali tebu sebagai hilir sungai. jadi pemerintah tidak hanya fokus di sungai kali tebu melainkan juga fokus di sungai yang berada di Kecamatan lain seperti Kecamatan Tambaksari, dan sebagainya.

---

[26] Wawancara bapak eko staf dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH) kota surabaya
[27] Wawancara bapak Indra staf UPTD Saluran Pematusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisilain, faktor pendukung berjalannya perda ini adalah ketersediaan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti yang telah dijelaskan diatas total ada 39 jenis fasilitas yang di sediakan untuk menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah di Surabaya. Selain itu juga telah di sediakan tumbuh-tumbuhan yang di tanam sendiri oleh pihak Dinas untuk menghiasi kota Surabaya. Tumbuhan tersebut di tanam di kebun bibit yang terletak di jalan raya Manyar dan Wonorejo Kota Surabaya. Tumbuhan itu lah yang digunakan untuk menghiasi pinggir-pinggir sungai kali tebu.

Gambar 5

Truk Pengangkut Sampah DKRTH

Sumber: Dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH) Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 6

Tanaman Penghias Bantaran Sungai

Sumber: Sungai kali tebu Kelurahan Tanah Kali Kedinding

Hambatan yang dialami komunitas peduli kali tebu dalam menjaga sungai kali tebu adalah kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah dengan warga sekitar. Hal itu yang di sayangkan oleh warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, padahal warga setempat sudah mempunyai semangat seperti mengikuti lomba untuk menghiasi bantaran sungai dengan tanaman dengan tujuan selain terlihat indah juga untuk menghalangi orang yang ingin buang sampah langsung ke sungai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisa dan Pembahasan

1. Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kelurahan Kenjeran Kota Surabaya

Setelah menjabarkan hasil penelitian dalam pembahasan sebelumnya, di poin ini penulis akan membahas semua hasil data yang telah di dapat menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang telah di jelaskan di bab sebelumnya. Miriam Budiarjo (2008) menjelaskan kebijakan atau *policy* adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.[28]

Lebih jelas lagi di ungkapkan oleh Lemieux seorang pakar dari Prancis (1995:7) menyatakan kebijakan publik sebagai *"the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time"* yang artinya produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.[29] Woll dalam kutipan Tangkilisan (2003:2) juga turut menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik

[28] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
[29] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Ke Penyusunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.[30]

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik tidak luput dari campur tangan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang atau hak dan kekuasaan untuk memecahkan masalah dengan cara membuat peraturan sesuai konstitusi yang berlaku. Kemudian ditujukan pada kelompok target yaitu masyarakat dengan tujuan masalah yang terjadi di tengah masyarakat dapat teratasi.

Taufiqurrahman mengutip dari Solichin, mengatakan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan. Jadi dalam pembuatan kebijakan publik terdapat tahapan-tahapan, ketika kita dapat memperinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:[31]

a. *Policy Demands* (Tuntutan Kebijakan)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan oleh masyarakat kepada pejabat pemerintah dan dilakukan oleh aktor lain baik dari pihak swasta maupun pemerintah sendiri. Dalam sistem politik ini bertujuan untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan kebijakan sangat bervariasi, mulai dari desakan umum, dengan tujuan agar pemerintah berbuat sesuatu hingga

[30] Hesel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi* (Yogyakarta: Lukman Offiset YPAPI, 2003) 2

[31] Taufiqurrahman, *Kebijakan PublikPendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014)5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengambil tindakan konkrit terhadap suatu masalah yang terjadi pada masyarakat.

b. *Policy Decisions* (Keputusan Kebijakan)

Keputusan kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk memberikan arahan terhadap suatu kebijakan publik. Dalam hal ini termasuk keputusan-keputusan untuk menciptakan status (ketentuan dasar), ketetapan atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. *Policy Statements* (Pernyataan Kebijakan)

Pernyataan kebijakan ialah pernyataan atau penjelasan secara resmi mengenai suatu kebijakan publik tertentu. Seperti halnya ketetapan MPR, keputusan Presiden, Dekrit Presiden, keputusan peradilan. Pernyataan atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah juga di laksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. *Policy Outputs* (Keluaran Kebijakan)

Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat di lihat yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena menyangkut yang telah dilakukan dengan tujuan merealisasikan apa yang telah di gariskan dalam suatu keputusan dan pernyataan kebijakan. Singkatnya kebijakan ini menyangkut atas apa yang ingin di kerjakan oleh pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Policy Outcomes* (Hasil Akhir Kebijakan)

Hasil akhir kebijakan adalah akibat atau dampak yang telah dirasakan masyarakat baik yang di harapkan atau pun tidak sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintahan dalam suatu bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada di masyarakat.

Sedangkan implementasi adalah suatu proses yang cepat dan tepat bergerak, dimana pelaksanaan kebijakan ini melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan di setujui, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya *policy maker* dengan tujuan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar mampu memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.[32]

Menurut penulis kebijakan tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya memang di buat khusus untuk mengatur proses pengelolaan sampah dan kebersihan di Surabaya agar lebih tertata sesuai peraturan, khususnya dalam pembahasan ini adalah sungai kali tebu. Karena mengingat bertambahnya penduduk setiap tahun maka diperlukan kebijakan tersebut.

[32] Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada skripsi penulis kali ini akan membahas tentang analisis kebersihan sungai kali tebu. Sesuai yang ada di peraturan daerah Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya. Mendalami bagaimana perda ini di terapkan di sungai kali tebu Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Karena peraturan daerah yaitu mencakup seluruh wilayah daerah tersebut, termasuk sungai kali tebu yang berada di Kota Surabaya. Dalam menerapkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, pemerintah kota Surabaya telah membagi tugas melalui dinas. Dinas daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini dinas yang bersangkutan adalah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH). Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau kota Surabaya dalam memudahkan upaya untuk menjaga kebersihan kota Surabaya maka membagi tiap-tiap tugas yang dinamakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari:

a. UPTD Pembersih Saluran Pematusan
b. UPTD Pemanfaatan Sampah
c. UPTD Pengelolaan Limbah Cair
d. UPTD Taman Rekreasi
e. UPTD Pemakaman

Demikian maka dalam hal kebersihan sungai yang menangani adalah UPTD Pembersih Saluran Pematusan. Dalam menjalankan tugasnya UPTD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saluran Pematusan bekerja sama dengan tim Yustisi. Dengan bekerja sama maka diharapkan dapat menjalankan Peraturan daerah sebaik-baiknya.

Teori George C. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik berdasarkan 4 komponen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dapat dijelaskan dari 4 komponen teori George C. Edward III (1980).

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran *(target group)* sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b) Sumberdaya, adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
d) Struktur Birokrasi, yaitu yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya prosedur operasi standart *(standart operating procedures* atau SOP).

Dari penjelasan teori George C. Edward III (1980) DKRTH telah memenuhi semua yang tertera di teori tersebut, namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari komponen pertama yaitu komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat berjalannya perda, sebagai contoh lahirnya komunitas peduli kali tebu. Komunitas ini lahir karena bentuk protes terhadap kinerja pemerintah daerah yang dirasa kurang maksimal dalam mengelola sampah. Dengan ini maka diharapkan pemerintah lebih mengapresiasi komunitas dan bekerja sama dengan warga lingkungan sekitar untuk menjalankan perda tersebut, tidak hanya member spanduk himbauan.

Kurangnya kinerja tim yustisi selaku penegak keadilan perda. Hal ini dapat dibuktikan melalui sampah yang masih berkeliaran di area sungai yang menandakan tidak ada tindakan dari pihak Yustisi. Hal ini juga dapat diperkuat melalui pernyataan warga yang mengaku bahwa tim yustisi tidak pernah ada tindakan yang membuat warga takut untuk membuang sampah sembarangan. Penulis meminta data para warga yang pernah menerima sanksi namun tim yustisi tidak dapat memberikan datanya.

Berikutnya adalah sumber daya, George C. Edward menjelaskan pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan. Karena jika tidak ada sumber daya maka peraturan tidak dapat berjalan. Menurut data yang penulis dapat, untuk petugas yang menangani area sungai kali tebu ada 10 sampai 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Namun dalam pembahasan kebersihan saluran air, yang perlu dijaga tidak area sungai kali tebu saja, melainkan harus dari hulu ke hilir. Jadi perlunya sumber daya manusia yang cukup untuk menangani masalah sungai.

Komponen berikutnya adalah disposisi. Disposisi yang dijelaskan oleh George C. Edward yaitu watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam hal ini untuk komitmen para implementor bisa dikatakan cukup kurang. karena harus ada tindakan dari warga baru pemerintah bergerak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya setelah terlahirnya komunitas sungai kali tebu pemerintah baru menjalankan kembali proses pengerukan sungai. Hal ini dapat di buktikan bahwa sungai yang bersebelahan dengan sungai kali tebu masih sangat kotor, karena warga yang bertempat tinggal di aerea sungai tersebut tidak pernah menuntut kebijakan pemerintah. Dan kurangnya sifat demokratis antara pemerintah dengan warga setempat, pemerintah kurang mengapresiasi kinerja warga kelurahan yang punya semangat dalam hal menjaga kebersihan sungai kali tebu. Demikian penjelasan penulis mengenai implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kelurahan Kenjeran Kota Surabaya

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam berjalannya implementasi perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah telah memadai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya telah tersedia 39 alat kebersihan mulai dari tong sampah ban karet 639 unit, tong sampah besi 3 unit, tong sampah biru dan orange 110 unit, mobil pick up total 58 unit, mesin pencacah sampah 31 unit, truk pengangkut sampah dan lain sebagainya. Itu semua menjadi faktor pendukung dalam berjalannya Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

Termasuk fasilitas penghalang sampah di sungai kali tebu yang telah di sediakan oleh Dinas Kebersihan yaitu *mechanical screen* yang di taruh di bagian hilir sungai ditujukan untuk menghalangi sampah yang mengalir di sungai kemudian sampah dikeruk menggunakan alat *mechanical screen* dan alat penghalang manual berupa bambu yang di bentangkan di pinggir sungai dengan tujuan untuk menghalangi aliran sampah yang berada di sungai, setelah sampa menumpuk di bambu tersebut kemudian ditarik dan diangkat sampahnya. Ini bertujuan agar sampah yang mengalir di sungai mudah untuk di bersihkan. Dengan beberapa alat tersebut yang menjadi pendukung berjalannya Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikutnya adalah hadirnya komunitas peduli kali tebu, meskipun komunitas ini lahir dari protes atas kurangnya kinerja pemerintah namun secara tidak langsung komunitas ini juga jadi faktor pendukung untuk berjalannya Perda karena bisa bekerja sama dalam menjalankan Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di sungai kali tebu dan komunitas peduli kali tebu juga sebagai penjembatan suara warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding kepada pemerintah. Dengan demikian komunitas kali tebu ini juga menjadi pendukung atas berjalannya peraturan daerah.

b. Faktor penghambat

Untuk faktor penghambat berjalannya perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebrsihan adalah kurangnya sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan oleh pihak dinas bahwa total ada 9 orang tim Yustisi dan ada 9 rayon untuk seluruh Kota Surabaya. Jadi dengan keterbatasan ini tidak dapat menjangkau seluruh Surabaya. Untuk menangani hal ini perlunya kerja sama antara pemerintah dengan warga agar memudahkan dalam menjalankan peraturan daerah. Jadi pemerintah kurang memperhatikan bagian pinggir kota seperti sungai kali tebu tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding menjadi faktor penghambat berjalannya Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

Kemudian tidak terlaksananya sanksi-sanksi peraturan daerah seperti yang telah dijelaskan dalam Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Sampah dan Kebersihan bahwa yang membuang sampah akan dikenakan sanksi atau denda. Bahwa yang melanggar akan dikenakan denda paling banyak senilai lima puluh juta rupiah paling rendah minimal teguran. Namun hal itu tidak pernah terlaksana, seperti pengakuan anggota komunitas peduli kali tebu dan warga setempat menjelaskan bahwa tidak pernah ada sanksi untuk orang yang masih buang sampah sembarangan. Namun dari pihak Yustisi menjelaskan bahwa tidak tega jika memberikan sanksi berupa denda yang tertera pada Perda tersebut. Langkah alternatif yang dilakukan oleh pihak Yustisi adalah menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh Walikota Surabaya yaitu Peraturan Walikota Nomor: 10 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut melarang setiap badan/orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan atau di tempat umum lainnya jika dilanggar maka akan dikenakan denda uang paksa tujuh puluh lima ribu rupiah dengan volume sampah 0,5 m^2 namun dalam realitasnya pihak Yustisi tidak pernah melakukan hal tersebut di Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Jadi dari pihak yustisi juga kurang komunikasi dengan warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Hal ini juga menjadi faktor penghambat berjalannya peraturan daerah Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

Kemudian kurangnya komunikasi dan kerja sama antara pemerintah dengan warga setempat. Dalam menerapkan perda diperlukan kerja sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pemerintah dengan warga setempat. Contoh antara Dinas dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, RT, RW dan juga kelompok masyarakat. Jika sudah ada kerja sama maka akan memudahkan dalam proses Implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Dalam menerapkan suatu kebijakan penting bekerja sama dengan warga, ini bertujuan untuk memudahkan penerapan suatu kebijakan dan mudah bersosialisasi kepada warga yang belum tahu tentang bahayanya membuang sampah secara sembarangan di sungai. jadi warga tidak hanya takut akan sanksi peraturan melainkan juga takut akan bahayanya jika membuang sampah di sungai.

D. Hasil Temuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di sungai kali tebu yang bertempat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 10

Hasil Temuan Penelitian

No.	Indikator	Penjelasan
1	Keterampilan implementor	Kurang memperhatikan area sungai kali tebu, harus ada gerakan dari warga dulu jika ingin diperhatikan oleh pemerintah
2	Sarana dan prasarana implementor	Telah memadai dan memiliki total 39 jenis alat kebersihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Sanksi peraturan daerah	Tidak/belum terlaksana semestinya
4	Sarana sungai kali tebu	- alat pemungut sampah manual (tebuat dari bambu) - alat pemungut sampah mechanical screen - tong sampah
5	Komunikasi dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH) Kota Surabaya dengan warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Masih kurang, hal ini terbukti dari pengakuan warga bahwa pihak pemerintah tidak ada komunikasi dengan warga sekitar
6	Peran komunitas peduli kali tebu	Penjembatan suara warga, penyampai aspirasi warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding -membantu berjalannya perda Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai analisis data, kemudian dalam bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan mengenai hasil yang di dapat mulai dari lapangan hingga proses analisis data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan implementasi Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya belum terlaksana secara maksimal. Hal ini sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya walaupun sudah melaksanakan 4 komponen yang dijelaskan oleh George C. Edward III namun tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor penghambat dan faktor pendukung berjalannya Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Berikut penjelasan kedua faktor tersebut:

1. Faktor pendukung

   Faktor pendukung dalam berjalannya perda ini adalah sarana dan prasarana yang telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari sarana yang di sediakan oleh pihak dinas yang terdiri dari kendaraan angkut sampah compactor total ada 47 unit, mesin pencacah sampah total 31 unit, TPS/DEPO total 188 unit, tempat sampah biru dan orange terbagi total 110 unit, tong komposter terbagi total 258 unit, dan beberapa sarana lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khususnya di sungai kali tebu telah di sediakan alat *mechanical screen* dan alat pemungut sampah manual juga tempat sampah yang telah disediakan di bantaran sungai kali tebu. Ini menjadi faktor pendukung berjalannya perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Kemudian hadirnya komunitas peduli kali tebu juga sangat mendukung. Dengan adanya komunitas tersebut pemerintah dapat bekerja sama untuk menerapkan perda tersebut.

2. Faktor penghambat

Dalam menerapkan sebuah peraturan daerah tentu tidak mudah. Mengingat sifat masyarakat yang beragam mulai dari orang yang acuh tak acuh terhadap lingkungan hingga orang yang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dalam menjalankan peraturan daerah tentang kebersihan memang perlu bersosialisasi kepada warga dan kerjasama. Karena sampah yang berada di sungai tebu tidak semua dari warga setempat tetapi juga dari aliran sungai sebelumnya dan dari orang-orang luar yang menggunakan motor dan membawa bungkusan sampah lalu dibuang begitu saja hal ini seperti yang dijelaskan oleh pihak kelurahan, pihak dinas dan pihak komunitas yang telah menyayangkan perbuatan tersebut. Jadi untuk kinerja pemerintah harus giat lagi dan harus mau merangkul warga setempat agar dapat membantu dalam penerapan Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebrsihan. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat berjalannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan daerah. Juga kurangnya konsisten dalam rutinan membersihkan area sungai.

Kurangnya respon pemerintah yang menjadi penghambat berjalannya suatu peraturan daerah. Tidak mempedulikan kepentingan warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding bahwa warga Kelurahan telah memiliki semangat untuk menangani masalah sungai namun pemerintah tidak merespon hal tersebut. Harus ada upaya atau gebrakan seperti yang dilakukan komunitas peduli kali tebu sebelumnya yaitu melakukan aksi demo dulu di kantor DPRD Kota Surabaya pemerintah baru mau merespon. Sanksi yang tertulis dalam perda tersebut juga tidak terlaksana semestinya, minimal berupa teguran kepada warga yang buang sampah sembarangan.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan mengenai implementasi Perda Nomor: 5 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebrsihan adalah perlunya komitmen pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah. Perlunya mengajak diskusi dengan warga karena turun langsung melihat kondisi sungai sangat penting dari sini pemerintah dapan memantau secara langsung tidak menunggu adanya gebrakan dari warga Kelurahan. Terlebih pihak Yustisi agar tetap harus menjalankan peraturan yang berlaku yaitu menegur warga yang tidak patuh, jika masih mengulang maka perlu di tindak lebih lanjut seperti yang tertulis di perda mengenai sanksi. Ini bertujuan agar Kota Surabaya dalam hal kebersihan bisa menyeluruh tidak hanya di bagian Kota namun juga bagian pelosok desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang dalam hal kebaikan perlu adanya paksaan, mengingat keragaman pola pikir warga. Tidak semua warga mempunyai pemikiran yang sama, ada yang peduli terhadap kebersihan lingkungan, ada pula yang acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan. Tujuan dari paksaan tersebut demi kebaikan agar warga yang masih buang sampah sembarangan enggan untuk berbuat seenaknya lagi dalam membuang sampah. Dengan berjalannya sanksi maka penerapan Perda Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan akan berjalan sesuai harapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Marzali, Amri "*Antropologi dan Kebijakan Publik*" Jakarta: kencana prenada media group, 2012.

Budiarjo, Miriam "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Surbakti, Ramlan "*Memahami Ilmu Politik*" Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Usman, Nurdin "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*" Jakarta: Grasindo, 2002.

Setiawan, Guntur "*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*" Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Winarno, Budi "*Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (edisi revisi)" Yogyakarta: media pressindo, 2007.

Islamy, M. Irfan "*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*" Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Musliichah "*Bunga Rampai Kearsipan*" Jakarta: kerjasama antara Grasindo, Gadjah Mada University Press, Anggota IKAPI, 2017.

Arikunta, Suharsimi "*Pengelolaan Kelas dan Siswa*" Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

Notoatmodjo, Soekidjo "*Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*" Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.

Ahmadi, Rulam "Metodologi Penelitian Kualitatif" YogyakartaL Ar-Ruzz Media, 2014.

Bungin, Burhan "*Penelitian Kualitatif edisi kedua*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Bungin, Burhan "*Metodologi Penelitian Sosial*" Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

Sugiyono "*Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D*" Bandung: Alfabeta, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prastowo, Andi "*Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian"* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syafi'i, Asrof "*Metodologi Penelitian Pendidikan*" Surabaya: Elkaf, 2005.

Soekanto, Soerjono "*Pengantar Penelitian Hukum*" Jakarta: Rineka Cipta, 1983.

Abdul Wahab, Solichin "*Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik"* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015

Tangkilisan, Hessel Nogi S. "*Kebijakan Publik yang Membumi*" Yogyakarta: Lukman Offiset YPAPI 2003

Taufiqurrahman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014

Nugroho, Rian. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik* Bandung: AlfaBeta, 2005

Parsons, Wayne. "*Public Policy*" Jakarta: Prenada Media, 2005

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.

Jones, Charles O. "*Pengantar Kebijakan Publik"* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Bandung: Alfabeta, 2016

Leo Agustino, "*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*" Bandung: Alfabeta, 2008

Samodra Wibawa, "*Evaluasi Kebijakan Publik*" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Manik, Karden E. Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup* Jakarta: Djambatan, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeloeng, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006

Indiahono, Dwianto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis edisi ke-2 revisi* Yogyakarta: Gava Media 2017.

Nugroho, Riant. *Public Policy* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2012.

Sinaga, Rudi Salam. *Pengantar Ilmu Politik* Yogyakarta: Graha Ilmu 2013.

Jurnal

Yulida, Novia Dkk. *Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah di Aliran Sungai Batang Bakarek-Karek Kota Padang Panjang Sumatera Barat.* Jurnal Berita Kedokteran Masyarakat. Vol. 32 Nomor 10. 2016

Said, La Ode Agus Dkk. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol. 4 Nomor 1. 2015.

Rizal, Mohamad *Analisis Pengelolaan Persampahan Perkotaan (Studi kasus pada Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*). Jurnal SMARTek. Vol. 9 Nomor 2. 2003.

Wibowo, Istiqomah. *pola perilaku kebersihan: studi psikologi lingkungan tentang psikologi lingkungan tentang penanggulangan sampah perkotaan.* Jurnal Makara, Sosial Humaniora. Vol. 13 Nomor 1. 2009.

Norival, Achmad. *Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Buana Vol. 2 Nomor 1. 2018.

Internet

Komunitaspedulikalitebusurabaya.blogspot.co.id

www.kemendagri.go.id

www.semampir-surabaya.kpt.web.id

http://dsmuda.com/jangan-buang-sampah-sembarangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id